

Rencana Strategis
BLUD UPTD Pengelolaan
Kawasan Konservasi di
Perairan Kepulauan Raja
Ampat
2024 - 2028

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Pentingnya mengelola Kawasan Konservasi di Perairan (KKP) Kepulauan Raja Ampat.....	4
1.2.1 Biofisik.....	5
1.2.2 Kearifan Lokal	Error! Bookmark not defined.
1.2.3 Ekonomi	6
1.2.4 Ancaman	7
1.2.5 UPTD PENGELOLAAN Kepulauan Raja Ampat sebagai pengelola kawasan konservasi 7	
1.2.6 Tugas dan fungsi pokok UPTD PENGELOLAAN Kepulauan Raja Ampat	7
1.3 Aspek-Aspek Pertimbangan UPTD Menerapkan BLUD	8
1.4 Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Bisnis.....	9
1.5 Ruang Lingkup Rencana Strategis Bisnis	9
BAB II. ARAH PENGELOLAAN KKP KEPULAUAN RAJA AMPAT.....	10
2.1 Arah Kebijakan	10
2.2 Pengembangan Layanan	10
BAB III. PROGRAM STRATEGIS	10
3.1 Analisis SWOT (Strength, Weaknes, Opportunities, Threat).....	10
3.1.1 Kekuatan (Strength).....	11
3.1.2 Kelemahan (Weaknes).....	11
3.1.3 Peluang (Opportunities)	11
3.1.4 Ancaman (Threat)	11
3.2 Program Strategis	12
3.2.1 Program Strategis Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian	13
3.2.2 Program Strategis Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Perairan	13
3.2.3 Program Strategis Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat sekitar KKP Kepulauan Raja Ampat	13
3.2.4 Program Strategis Pemantauan dan Evaluasi	14
3.3 Program dan Kegiatan	14
BAB IV. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA DAN RENCANA PENCAPAIAN LIMA (5) TAHUN ...	15
4.1 Pengukuran Capaian Kinerja	22
4.2 Pencapaian Kegiatan Sejak Dibentuk.....	22
4.3 Rencana Pencapaian Lima (5) Tahun Mendatang	23
BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBIAYAAN	29
5.1 Rencana Biaya Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.....	29

5.2	Sumber Dana Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat	30
5.2.1	Tarif Retribusi Layanan Kawasan Konservasi (Jalasasi)	30
5.2.2	Hibah	31
5.2.3	Pendapatan APBD dan lainnya.....	32
BAB VI.	PROYEKSI KEUANGAN	342
6.1	Prognosa Neraca	342
6.2	Prognosa Pendapatan (Surplus/Defisit).....	353
6.3	Prognosa Model Kerja (Biaya dan Sumber dana)	375
6.4	Proyeksi Rasio Keuangan.....	375
BAB VII.	PENUTUP	397
LAMPIRAN.....		408

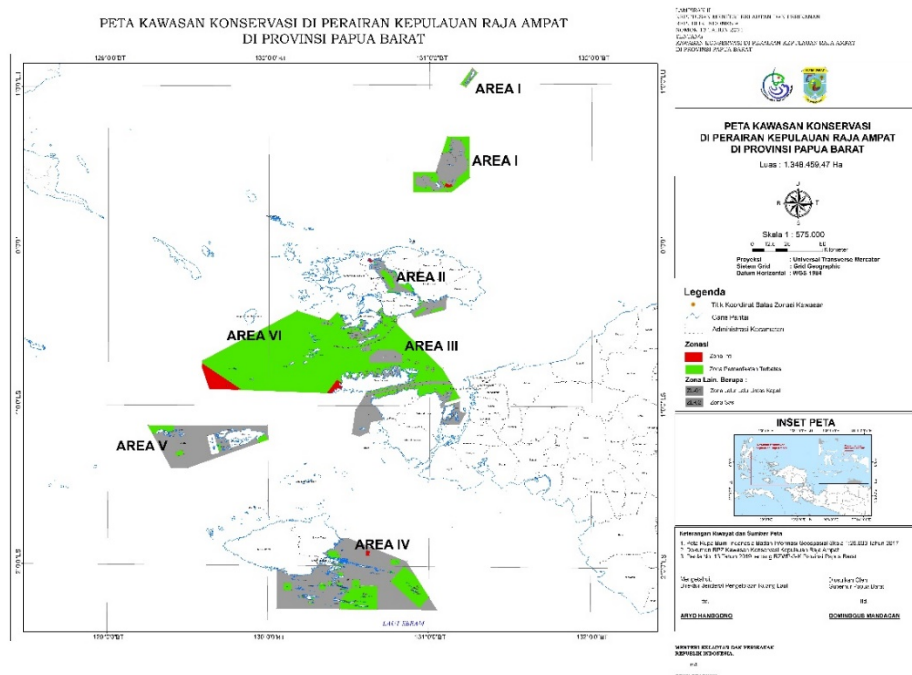
BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perairan Kepulauan Raja Ampat telah dikenal memiliki alam laut yang indah dan kaya akan keragaman hayati, baik secara nasional maupun internasional. Keragaman hayati lautnya tertinggi di dunia dengan satwa endemik dan habitat yang unik, serta bentang alam yang menakjubkan memberikan fungsi biofisik serta sosial ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitar Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia. Kondisi alam yang indah dan kaya ini sangat jarang ditemui di dunia, untuk itu perlu dijaga, dilestarikan dan perlu dikelola secara bijaksana agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan beberapa bagian di perairan di Kepulauan Raja Ampat sebagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP) melalui Kepmen KP No. 13 tahun 2021 tentang penetapan Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat (KKP Kep. Raja Ampat). Keputusan ini menetapkan wilayah Selat Dampier, Teluk Mayalibit, Kepulayan Ayau-Asia, Misool Bagian Selatan, Kofiau-Boo dan Kepulauan Fam, serta Misool Bagian Selatan berdasarkan Kepmen KP No. 191 Tahun 2023 tentang KKP Wilayah Misool Utara Kepulauan Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya sebagai kawasan yang dilindungi dengan luas keseluruhan 1.657.236,82 Ha, dikelola sebagai Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya.

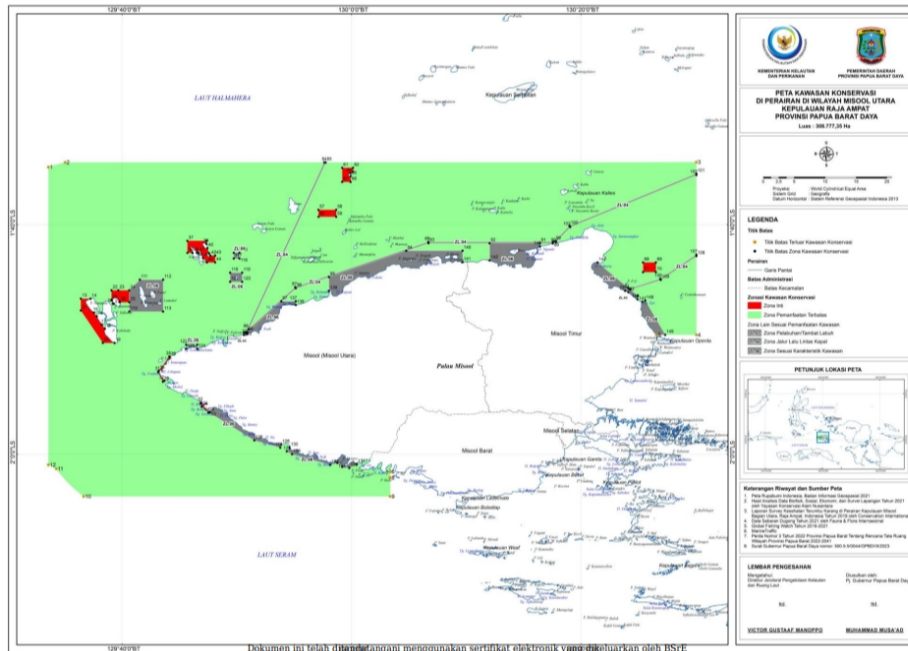
Kawasan konservasi ini dikelola dengan sistem zonasi, secara kolaboratif dengan melibatkan masyarakat setempat serta sistem jejaring karena terdapat keterkaitan antara satu kawasan dengan kawasan lainnya.



Gambar 1. Peta Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat berdasarkan Kepmen KP 13/2021

PETA KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH MISOOL UTARA KEPULAUAN RAJA AMPAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 191 TAHUN 2023
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH MISOOL UTARA KEPULAUAN RAJA AMPAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA



Gambar 1. Peta KKP Wilayah Misool Utara berdasarkan Kepmen KP 191/2023

Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat, untuk saat ini, berada dibawah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (P2KP) Provinsi Papua Barat Daya, dengan dibentuknya lembaga pengelola yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sebagai Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) yang melaksanakan pengelolaan KKP berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 26 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat pada Dinas Pertanian, Pangan Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka pemenuhan efektivitas pengelolaan, pembiayaan yang berkesinambungan, peningkatan layanan, kemandirian dalam pengelolaan maka Gubernur Papua Barat Daya menetapkan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat, sesuai Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/174/10/2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat pada Dinas Pertanian, Pangan Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.

Penerapan PPK-BLUD pada lembaga UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah strategi untuk pencapaian efektivitas, keberlanjutan, pembiayaan pengelolaan berkesinambungan yang tidak bergantung pada APBD.

1.2 Pentingnya mengelola KKP Kepulauan Raja Ampat

Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat menjadi sangat penting dengan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan, dimana kondisi biofisik keanekaragaman hayati dan ekosistemnya yang sangat bernilai, berikut kearifan lokal masyarakat yang terkait didalamnya sangat penting untuk

dipertahankan karena mempunyai nilai potensi ekonomi yang sangat besar sehingga menjadi penting untuk dikelola dengan baik, terlebih dengan status Taman di Perairan maka potensi pemanfaatan terbuka luas seperti pemanfaatan keindahan bawah laut oleh wisata bahari.

1.2.1 Biofisik

Oleh para ahli biologi kelautan menjuluki Raja Ampat dikenal istilah “*A virtual fish factory*” atau “*Epicenter of marine biodiversity*” sebagai gambaran keunikan dan kekayaan keanekaragaman hayati ekosistem yang terkandung di pesisir dan laut raja ampat. Selain itu raja ampat disebut sebagai “*Underwater Paradise* (surga bawah laut)”

Saat ini perairan Raja Ampat menjadi rumah bagi 69,21% spesies karang dunia, dimana ditemukan 553 jenis karang (Veron et al., 2009) dan dua diantaranya merupakan jenis endemik Raja Ampat dari keluarga Acroporidae yaitu *Montipora delacatula* dan *Montipora verruculosus* (DeVantier et al., 2009). Selain itu ditemukan setidaknya 41 jenis dari 90 genus karang lunak Alcyonacean dari 14 Famili (Donnelly et al., 2002). Di wilayah ini juga ditemukan 699 jenis moluska dan menjadi rumah bagi 5 jenis penyu (McKenna et al., 2002), setidaknya 1.580 jenis ikan karang (Allen dan Erdmann, 2012; update Erdmann, 2018) dan rumah bagi 15 jenis mamalia laut yang terdiri dari 14 jenis *cetacean* (13 jenis paus dan lumba-lumba) dan 1 jenis duyung (*Dugong dugon*) (Kahn, 2007). Salah satu pemicu keanekaragaman yang luar biasa ini adalah tingginya keragaman habitat mulai dari lamun, *mangrove*, terumbu karang di perairan dangkal (termasuk terumbu karang tepi, penghalang, *patch* dan *atoll*) hingga celah dalam antar pulau-pulau kecil utama. Dengan tingkat keragaman hayati yang begitu tinggi, para ilmuwan menyebut Kepulauan Raja Ampat sebagai jantung Segitiga Karang Dunia.

1.2.2 Kearifan Lokal

Masyarakat di kepulauan Raja Ampat masih menganut sistem kekerabatan berdasarkan marga. Meskipun kelompok masyarakat Papua utamanya berasal dari kelompok etnis Maya (yang terdiri dari sub etnis Ambel, Langganyan, Tipin, Saorof, Mocu, Fiawat, Kawe, Waweyai dan Matbat), komposisi penduduk Raja Ampat yang ada saat ini lebih rumit yang merupakan asimilasi dengan masuknya kelompok suku Biak, Halmahera, Seram dan Sorong ke wilayah ini bertahun-tahun yang lampau.

Masyarakat adat di Raja Ampat menganut sistem kepemilikan tanah dan laut yang kompleks yang mengatur kepemilikan dan pemanfaatan. Kepemilikan tanah dan laut tidak ditulis dalam bentuk hukum formal melainkan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi di mana hak kepemilikan diberikan kepada individu, keluarga, marga atau seluruh masyarakat. Batas kepemilikan untuk laut tidak secara eksplisit ditetapkan di atas peta atau dokumen resmi tetapi umumnya disepakati dan diakui oleh masyarakat adat.

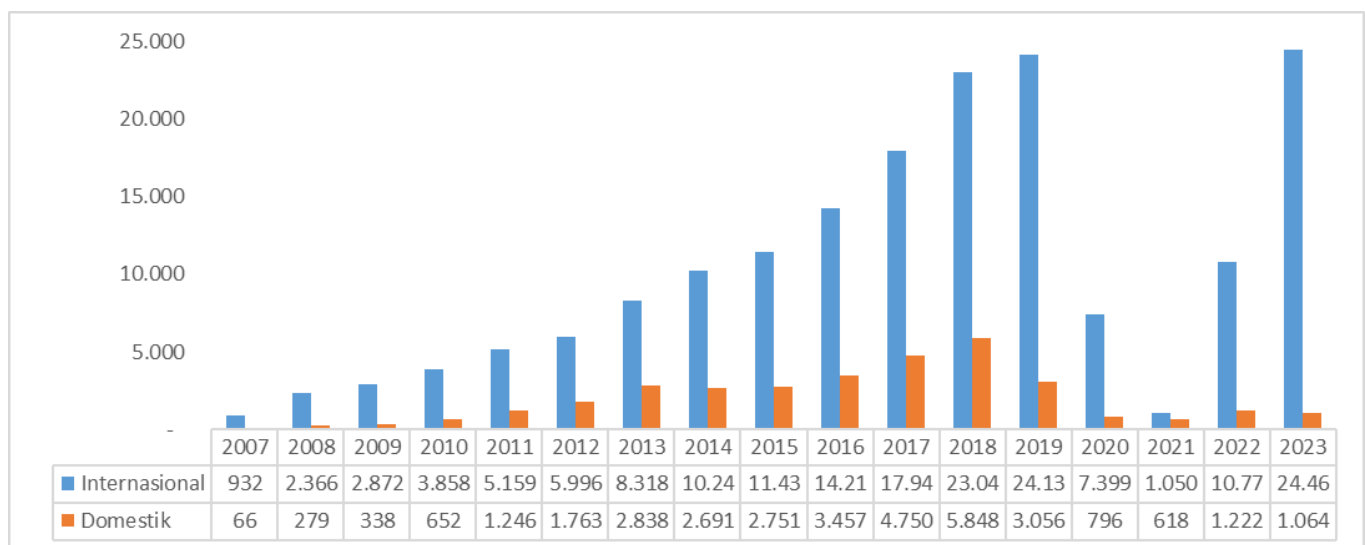
Masyarakat Raja Ampat juga melaksanakan sistem pengelolaan sumber daya darat dan laut tradisional yang disebut dengan “*Sasi*.” Sasi untuk wilayah laut sering berupa pelarangan tangkapan untuk jenis-jenis tertentu pada kurun waktu tertentu pula (misalnya teripang, *trochus* atau kima, dan lobster), bisa juga penutupan wilayah tangkap tertentu (atau sekaligus dengan jenis-jenis tertentu) selama periode waktu tertentu. Pada kebanyakan masyarakat Raja Ampat yang mempraktekkan sasi, gereja dan masjid, marga, bahkan kelompok perempuan seringkali memainkan peran penting dalam menetapkan aturan tentang penutupan wilayah dan penangkapan (termasuk tenggang waktu, jenis yang boleh

ditangkap, alat tangkap yang diijinkan, waktu penangkapan dan lokasinya, siapa saja yang diberi hak untuk melakukan penangkapan) dan pembagian hasil bersama. Seperti halnya dengan daerah lain di bagian timur Indonesia, praktek sasi semakin berkurang penerapannya oleh masyarakat Raja Ampat, namun baru-baru ini telah direvitalisasi kembali sebagai hasil dari inisiatif pengelolaan KKP di Kepulauan Waigeo Sebelah Barat, Teluk Mayalibit, Selat Dampier, Ayau, Kepulauan Fam, Kofiau dan Misool di bagian utara maupun selatan.

1.2.3 Ekonomi

KKP Kepulauan Raja Ampat dengan visi ***mewujudkan pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat secara efektif dan berkelanjutan berbasis ekosistem dan kearifan lokal masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat***, dengan demikian diharapkan KKP harus mampu mendorong sektor jasa lingkungan sumber daya alam laut yang memanfaatkan sumber daya tersebut dengan tidak merusak (*blue economy*) disaat yang sama sektor perikanan tangkap, budi daya dengan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana tidak melampaui daya tampung sehingga *over fishing* dan dapat menjadi pendorong dan penggerak bagi perekonomian regional utama bagi daerah Provinsi Papua Barat Daya maupun daerah di Bentang Laut Kepala Burung.

Komoditi perikanan utama bagi masyarakat setempat seperti tuna, tenggiri, kerapu, napoleon, kakap merah, teripang, udang dan lobster, budi daya kerang mutiara, kerapu dan rumput laut merupakan sektor yang menjanjikan. Sementara KKP memberikan manfaat lain berupa jasa lingkungan yang dimanfaatkan oleh sektor wisata bahari dimana dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan dan merupakan kontributor terbesar ke-dua. Angka kunjungan pemanfaat jasa lingkungan KKP tercatat sebesar lebih dari 27.187 pada tahun 2019, yang disokong 106 kapal wisata, serta tersedianya 147 unit homestay dan 33 resor.



Gambar 2. Grafik jumlah pemanfaat jasa lingkungan KKP Kepulauan Raja Ampat (wisata bahari) tahun 2007 – 2023

1.2.4 Ancaman

Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat masih terdapat sejumlah masalah yang berpotensi menjadi ancaman bagi ekosistem laut, antara lain masih tumpang tindihnya regulasi antar pemerintah yang melampaui kewenangan khususnya dalam pemanfaatan perairan/KKP. Sehingga diperlukan dukungan pengelolaan strategis baik berupa kebijakan maupun upaya mengembangkan Sistem Pemantauan, Pengendalian & Pengawasan Pemanfaat Kawasan Konservasi (SISPANDALWAS) di Perairan Kepulauan Raja Ampat .

Secara singkat, ancaman-ancaman tersebut secara umum dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama yang dianalisis dapat memberi dampak negatif terhadap ekosistem laut. Beberapa ancaman yang menjadi perhatian sekarang ini disebutkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Ancaman terhadap Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat

Kategori ancaman	Ancaman
Pemanfaatan sumber daya laut secara tidak berkelanjutan	Penangkapan ikan berlebih
	Penangkapan yang merusak (bom, racun, <i>trawl</i> , cantrang, dll.)
	Pencurian spesies rentan yang dilindungi
	Kegiatan wisata bahari bahari yang tidak ramah lingkungan dan tidak terkendali
	Pemanfaatan kawasan yang tidak terkendali
Dampak dari aktivitas dan pembangunan di daratan	Erosi dan sedimentasi dari pembangunan kawasan pesisir yang kurang terencana
	Polusi dan khususnya sampah plastik dari aktivitas di darat
	Dampak dari aktivitas dan pengembangan fasilitas wisata di darat
	Dampak dari penambangan di darat
Ancaman dari luar	Perubahan iklim
	Spesies yang menyerang
Perubahan kearifan lokal	Pertumbuhan populasi dan arus masuk penduduk lain
	Gangguan terhadap kepemilikan tradisional dan sistem pengelolaan sumber daya (termasuk sasi)
	Masuknya investasi dalam bidang wisata bahari yang tidak terkendali
	Perubahan mata pencaharian dari pertanian-perikanan ke layanan wisata

1.2.5 UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat Sebagai Pengelola Kawasan Konservasi

Sebagai SUOP, UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kep. Raja Ampat adalah format yang tepat sebagai lembaga pengelola berada dibawah Dinas P2KP. UPTD mengelola 7 area yang mencakup luas 1.657.236,82 ha di wilayah perairan Provinsi Papua Barat Daya.

1.2.6 Tugas dan Fungsi Pokok UPTD Pengelolaan KKP Raja Ampat

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 26 Tahun 2023 UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat mempunyai tugas membantu, untuk saat ini, Kepala Dinas P2KP Papua Barat Daya dalam melaksanakan tugas teknis perlindungan, pemanfaatan serta pelestarian pada wilayah perairan konservasi Raja Ampat. Sedangkan fungsinya yaitu:

- penyusunan rencana dan program kerja UPTD;

- b. penyiapan bahan dan petunjuk teknis serta prosedur perlindungan;
- c. pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap habitat dan jenis ikan serta biota lainnya;
- e. pelaksanaan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan konservasi;
- f. pemantauan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- g. perlindungan terhadap aturan zonasi di KKP Kepulauan Raja Ampat;
- h. pengoordinasian pengawasan, pemanfaatan sumber daya perlindungan pada KKP Kepulauan Raja Ampat;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sumber daya kelautan dan perikanan di KKP Kepulauan Raja Ampat;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas secara berkala;
- l. pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD; dan
- m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Kepala Dinas

1.3 Aspek-Aspek Pertimbangan UPTD Menerapkan BLUD

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2018, yang dimaksud dengan **Badan Layanan Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Dengan penerapan BLUD. Fleksibilitas yang diberikan antara lain memiliki kewenangan dalam hal:

- 1) Pengelolaan dana secara langsung dari seluruh pendapatan jasa layanan tahun berjalan;
- 2) Pengelolaan barang dan/atau jasa;
- 3) Pengelolaan hutang;
- 4) Pengelolaan piutang;
- 5) Pengelolaan Investasi (jangka pendek & jangka panjang);
- 6) Perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan;
- 7) Kerjasama dengan pihak lain.

Salah satu hal terpenting yang diharapkan adalah kemandirian dan keberlanjutan pembiayaan pengelolaan KKP, sebagai contoh penerimaan UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat berasal dari Tarif Retribusi Layanan Kawasan Konservasi (Jalasasi). Dengan penerapan BLUD, UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat, maka pendapatan dari tarif layanan tersebut dapat digunakan langsung untuk biaya operasional dan non operasional pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

Selain dari jasa layanan tersebut, UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat tetap dapat memperoleh anggaran dari APBD/APBN sebagaimana unit kerja lain di bawah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta hibah dari lembaga non-pemerintah, kerjasama program dengan pihak lain.

Oleh karena itu, UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat di bawah Dinas P2KP Papua Barat Daya akan mengikuti alur yang sama dengan cara mendapatkan status sebagai BLUD penuh.

1.4 Maksud dan Tujuan Rencana Strategis

Dokumen ini disusun dengan maksud agar dapat dijadikan panduan operasional UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya sebagai pengelola kawasan konservasi perairan yang ada di Raja Ampat. Dalam perencanaannya disesuaikan dengan masa berlaku, visi dan misi RPJMD, Renstra Dinas P2KP Provinsi Papua Barat Daya, sehingga maksud RPJMD dapat diimplementasikan melalui program dan kegiatan nyata dibidang konservasi perairan.

1.5 Ruang Lingkup Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018, Rencana Strategis merupakan rencana strategis 5 tahunan yang mencakup antara lain rencana pengembangan layanan, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, rencana keuangan. Rencana Strategis UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Daya sebagai DOB memiliki sistematika berikut:

- a. Arah pengelolaan
- b. Program strategis
- c. Pengukuran capaian kinerja dan rencana pencapaian lima (5) tahun
- d. Rencana pembiayaan
- e. Proyeksi keuangan

BAB II. ARAH PENGELOLAAN KKP KEPULAUAN RAJA AMPAT

2.1. Arah Kebijakan

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Daya menetapkan arah kebijakan kewilayahan dan lingkungan, antara lain: peningkatan konservasi dan rehabilitasi serta pencegahan dampak negatif pemanfaatan SDA, penguatan industri pariwisata dan kelautan berbasis ekowisata dan masyarakat serta bertaraf internasional.

Dengan arah kebijakan tersebut diatas maka Renstra disusun meliputi:

1. Mengatur penggunaan KKP dengan penguatan sistem zonasi dalam melindungi keanekaragaman hayati, sumber daya perikanan dan ekosistem perairan.
2. Mendukung mata pencaharian dan pemanfaatan jasa lingkungan yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun kapasitas sumber daya manusia dan institusi lokal (adat) untuk secara efektif bekerjasama dalam mengelola sumberdaya laut dan jasa kelautan.
4. Meningkatkan kapasitas pengelola jejaring sasi antar kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Bentang Laut Kepala Burung maupun nasional.

2.2. Pengembangan Layanan

Rencana pengembangan layanan mencakup 3 aspek yaitu sebagai berikut:

1. Aspek perlindungan

Pada aspek ini terbagi dua diantaranya perlindungan biota yaitu identifikasi jenis biota yang dilindungi, terancam punah, endemik, ikonik, dan bernilai ekonomis, serta perlindungan habitat yaitu pemantauan pada zona inti, zona larang ambil (*no take zone* atau NTZ), tata batas dan rehabilitasi ekosistem.

2. Aspek pelestarian

Aspek ini meliputi pengawasan, pengendalian pemanfaatan, penegakan hukum sesuai zona peruntukannya.

3. Aspek pemanfaatan

Aspek ini meliputi sumber daya ikan yang mencakup pengawasan dan pengendalian, penangkapan ikan serta regulasi penangkapan dan jasa lingkungan KKP mencakup pengawasan, pengendalian, pemanfaatan jasa lingkungan/wisata bahari, regulasi pemanfaatan KKP, sistem pengendalian kapal (kapal wisata, kapal perikanan), pengelolaan situs selam, pemantauan situs selam (titik pemanfaatan tinggi), regulasi pemanfaatan jasa lingkungan.

BAB III. PROGRAM STRATEGIS

Untuk mewujudkan arah kebijakan di atas agar dapat berjalan dengan baik serta tercapainya tujuan maka dilakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan melalui analisis SWOT.

3.1. Analisis SWOT (*Strength, Weaknes, Opportunities, Threat*)

Analisis SWOT membantu dalam memutuskan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan melakukan perbaikan untuk mengatasi kelemahan yang ada untuk menggunakan sebaik-baiknya peluang yang ada dan mengantisipasi ancaman yang ada. Analisis SWOT mencakup identifikasi beberapa hal berikut:

3.1.1 Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah

- 1) Memiliki legalitas yang memberi mandat untuk melakukan pengelolaan kawasan konservasi yang ada di Raja Ampat.
- 2) Tersedia sarana dan prasarana (kantor, pos pengawas, *speedboat*, dll.) untuk operasional pengelolaan KKP.
- 3) Komposisi staff profesional non-PNS yang cukup terlatih dan berpengalaman dalam bekerja.
- 4) Telah memiliki Rencana Pengelolaan yang akan menjadi pedoman pengelolaan.
- 5) Telah ditetapkan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.
- 6) Telah ada regulasi tarif layanan/retribusi jasa usaha wisata bahari sehingga ada kemampuan pembiayaan secara mandiri.
- 7) Telah memiliki panduan pemanfaatan KKP berupa hasil survei daya tampung.

3.1.2 Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah:

- 1) Jumlah sumber daya manusia pengelola yang ada perlu disesuaikan dengan kebutuhan agar efektif dan efisien.
- 2) Masih memerlukan sejumlah regulasi untuk memperkuat pengelolaan KKP.
- 3) Jaminan pendanaan jangka panjang masih kurang.
- 4) Belum tersosialisasinya secara optimal sejumlah aturan dan kewenangan kepada masyarakat, pemangku terkait, pelaku usaha pemanfaatan KKP.
- 5) Kerjasama dan koordinasi dengan instansi/dinas-dinas dalam pelaksanaan program-program pemerintah di dalam dan sekitar kawasan konservasi belum optimal.
- 6) Belum adanya panduan dalam pengembangan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di dalam KKP agar tidak berdampak terhadap lingkungan terutama kawasan konservasi.
- 7) Strategi dan mekanisme penerapan tarif, distribusi tarif antara provinsi dan kabupaten masih perlu diselaraskan.

3.1.3 Peluang (*Opportunities*)

Peluang UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah:

- 1) RPD peningkatan konservasi dan rehabilitasi serta pencegahan ancaman pemanfaatan SDA.
- 2) Kondisi biofisik KKP yang baik berupa keanekaragaman hayati dan ekosistem perairan dengan kawasan terumbu karangnya merupakan daya tarik besar bagi pengembangan sektor perikanan dan wisata bahari.
- 3) Kearifan lokal masyarakat yang mendukung pemanfaatan lestari.
- 4) Adanya komitmen pembiayaan dari lembaga pemberi hibah, dan dukungan mitra konservasi serta dukungan pembiayaan/sarana dan prasarana oleh Dinas P2KP Provinsi Papua Barat Daya.
- 5) Tingginya kesadaran dari pengguna KKP untuk memberi kontribusi melalui tarif retribusi layanan kawasan konservasi.

3.1.4 Ancaman (*Threat*)

Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya pada bab pendahuluan, berikut adalah ancaman-ancaman yang dihadapi sekarang ini dan yang kemungkinan akan dihadapi dimasa akan datang:

- 1) Penangkapan ikan berlebih.

- 2) Penangkapan ikan yang merusak.
- 3) Penangkapan spesies rentan yang dilindungi.
- 4) Tingginya tingkat erosi dan sedimentasi sebagai akibat dari pembangunan/penambangan kawasan pesisir yang kurang terencana.
- 5) Potensi pemanfaatan ruang laut yang sangat besar.
- 6) Intesitas pengunjung atau pemanfaat kawasan semakin tinggi.
- 7) Penanganan sampah yang tidak baik terutama sampah plastik, limbah cair, rumah tangga/kapal-kapal belum tertangani dengan baik.
- 8) Pemanfaatan KKP oleh kapal wisata, lego jangkar dan penumpukan berlebih di satu titik pemanfaatan pada waktu yang bersamaan.

3.2 Program Strategis

Program strategis merupakan penjabaran dari misi pengelolaan KKP Raja Ampat sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan pengelola dan para pihak
2. Penguatan pengelolaan sumber daya
3. Penguatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dalam wilayah kawasan konservasi perairan
4. Pemantauan SDA, pengendalian dan evaluasi

Berdasarkan analisis SWOT, maka hubungan keterkaitan antara arah kebijakan yang telah ditetapkan dan program strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hubungan Arah Kebijakan dan Program Strategis

Arah dan kebijakan	Program Strategis
[1] Mengatur penggunaan KKP dengan penguatan sistem zonasi dalam melindungi keanekaragaman hayati, sumber daya perikanan dan ekosistem perairan.	[Strategi 2] Penguatan pengelolaan sumber daya perairan
	[Strategi 4] Pemantauan SDA, evaluasi dan pengawasan
[2] Mendukung mata pencaharian masyarakat dan pemanfaatan jasa lingkungan bagi keberlangsungan pengelolaan kawasan konservasi.	[Strategi 3] Penguatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dalam wilayah kawasan konservasi
[3] Membangun kapasitas sumber daya manusia dan institusi lokal (adat) untuk secara efektif bekerjasama dalam mengelola sumber daya laut dan jasa kelautan.	[Strategi 1] Penguatan kapasitas kelembagaan pengelola dan para pihak
	[Strategi 4] Pemantauan SDA, evaluasi dan pengawasan
[4] Meningkatkan kapasitas pengelola jejaring Sasi antar kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Bentang Laut Kepala Burung maupun nasional.	[Strategi 1] Penguatan kapasitas kelembagaan pengelola dan para pihak
	[Strategi 3] Penguatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dalam wilayah kawasan konservasi

3.2.1 Program Strategis Penguatan Kelembagaan Pengelolaan dan Para Pihak

Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat terletak pada kekuatan kelembagaan SUOP. Lembaga pengelola kawasan konservasi harus memiliki kemampuan dan keterampilan teknis pengelolaan kawasan yang memadai untuk menjalankan program-program pengelolaan. Program strategis ini mencakup beberapa kegiatan berikut:

- 1) Pemantapan UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sebagai SUOP.
- 2) Peningkatan kapasitas pengelola UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
- 3) Pengembangan sarana dan prasarana.
- 4) Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan.
- 5) Implementasi jejaring kawasan konservasi di Bentang Laut Kepala Burung di Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Papua Barat dan Papua Barat Daya
- 6) Komunikasi dan publikasi
- 7) Pertemuan dengan mitra kerja/koordinasi lembaga penelitian/perguruan tinggi/mitra lainnya.

3.2.2 Program Strategis Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Perairan

Kegiatan pengelolaan diarahkan agar mampu berjalan sesuai dengan rencana pengelolaan sekaligus mengatasi ancaman-ancaman baik yang ada saat ini maupun di masa mendatang. Hanya saja sebagian dari kegiatan mungkin tidak dapat dilaksanakan di wilayah yang terpencil yang memerlukan sebuah pengelolaan yang bersifat integratif dan koordinatif.

Program strategis penguatan pengelolaan sumber daya perairan meliputi beberapa kegiatan berikut:

- 1) Perlindungan habitat dan populasi ikan.
- 2) Rehabilitasi ekosistem.
- 3) Ekowisata dan jasa lingkungan.
- 4) Pemantauan dan pengendalian kawasan konservasi perairan.
- 5) Pengelolaan spesies yang dilindungi dan terancam punah.
- 6) Spesies introduksi/*restocking*.
- 7) Perikanan budi daya.
- 8) Perikanan tangkap.
- 9) Mitigasi degradasi lingkungan akibat pembangunan di pesisir dan laut.
- 10) Adaptasi perubahan iklim.

3.2.3 Program Strategis Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat di Kawasan

Salah satu tujuan utama pengelolaan dari KKP Kepulauan Raja Ampat adalah mempertahankan, meningkatkan serta menguatkan mata pencaharian masyarakat sekitar kawasan, terutama yang bergantung pada sumber daya perairan.

Guna memerhatikan kesejahteraan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan, pengelola KKP akan merancang dan mempromosikan mata pencaharian ramah lingkungan guna mendukung pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

Kegiatan-kegiatan yang berpotensi besar untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dengan menciptakan kesempatan kerja masyarakat lokal sekaligus melestarikan sumber daya perairan di KKP Kepulauan Raja Ampat, diantaranya budi daya dan ekowisata.

Selain itu, pengelola KKP akan memfasilitasi dan mengevaluasi kegiatan pendidikan lingkungan hidup yang mendukung pengelolaan KKP tersebut. Dalam pelaksanaan program/kegiatan terkait dengan upaya ini, satuan unit organisasi pengelola KKP akan mendukung dan bekerjasama dengan mitra-mitranya. Program strategis ini mencakup:

- 1) Pendidikan lingkungan hidup.
- 2) Pemberdayaan/penguatan kelembagaan masyarakat adat dalam Kawasan.
- 3) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

3.2.4 Program Strategis Pemantauan SDA, Pengendalian dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi merupakan alat untuk mengukur keberhasilan dari setiap program. Melalui strategi ini dapat dipantau apakah program yang sedang dijalankan sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran atau tidak.

Program pengelolaan KKP Raja Ampat perlu di-*monitor*/dipantau dan dievaluasi dengan menggunakan sebuah metode standar untuk menemukan kendala-kendala dalam aktivitas pengelolaan serta mencari alternatif pemecahannya.

Pemantauan dilaksanakan secara rutin sesuai kebutuhan, sedangkan evaluasi dilaksanakan setiap tahun sekali. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program atau kegiatan pada tahun berikutnya.

Program strategis pemantauan dan evaluasi ini meliputi:

- 1) Pemantauan dan evaluasi kelembagaan pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
- 2) Pemantauan dan evaluasi pengawasan, pengendalian dan penegakkan hukum di KKP Kepulauan Raja Ampat.
- 3) Pemantauan dan evaluasi kondisi sumber daya alam dan sosial ekonomi.
- 4) Pemantauan dan evaluasi kegiatan wisata bahari di KKP Raja Ampat.
- 5) Evaluasi efektivitas pengelolaan dan dokumen rencana pengelolaan KKP Raja Ampat.

3.3 Program dan Kegiatan

Program-program strategis yang telah ditetapkan diharapkan dapat berjalan lancar dalam kurun waktu 5 tahun. Waktu pelaksanaan ke-empat program strategis yang telah ditetapkan tersebut dapat dilihat pada setiap tabel untuk setiap program.

Program dan kegiatan tidak sepenuhnya akan dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat. Pihak lain seperti Konservasi Indonesia (KI) dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) akan tetap mendukung pelaksanaan program strategis sambil memperkuat UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat agar pada tahun-tahun mendatang lembaga ini dapat mandiri. Kantor atau dinas-dinas Pemerintah Kabupaten Raja Ampat lainnya perlu juga dikoordinasikan agar bisa mengambil peran dalam mencapai arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Mitra kerja atau mitra pelaksana telah diidentifikasi untuk beberapa kegiatan dalam setiap program strategis. Mitra inilah yang akan mendukung UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

Waktu pelaksanaan untuk setiap program strategis dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan untuk Setiap Program Strategis

No.	Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	RPJM Periode I (Tahun)				
					1	2	3	4	5
I. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola dan Para Pihak	1	Pemantapan UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat	a.	Pengembangan struktur organisasi UPTD dan rekrutmen staf					
				1. Terbentuknya seksi wilayah pengelola kawasan	2 seksi wilayah	√			
				2. Ditetapkannya Kepala Bagian Tata Usaha dan Bendahara	3 orang	√			
				3. Pembentukan unit bisnis	5 unit bisnis			√	
				4. Penguatan dan pemantapan pos pengawasan	10 pos pengawas an	√	√	√	
				5. Rekrutmen staf	5 orang	√	√		
				6. Pengkajian struktur lembaga Pengelola	1 dokumen	√			
				7. Penyusunan SOP SUOP	1 dokumen	√	√		
				8. Revisi Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi KKP Kepulauan Raja Ampat	1 dokumen	√	√		
				9. Revisi regulasi penetapan KKP Kepulauan Raja Ampat	1 dokumen		√		
	2	Peningkatan kapasitas pengelola UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat	a.	Sertifikasi profesi pengelola kawasan konservasi	30 orang	√	√	√	√
			b.	Diklat staf UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat	4 orang		√	√	√
			c.	Pelatihan staf UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat					
				1. Pelatihan personil patroli jaga laut	3 kali pelatihan, 47 orang	√		√	√
				2. Pelatihan tim pemantauan/ <i>monitoring</i> SDA KKP	3 kali pelatihan, 8 orang	√		√	√
				3. Kursus Bahasa Inggris	6 orang	√	√	√	√

			4. Pelatihan pengelolaan data dan informasi	4 orang	√	√	√	√	√
			5. Pelatihan tata laksana perkantoran	5 orang	√	√	√	√	√
			6. Pelatihan administrasi keuangan dan perencanaan	4 orang	√	√	√	√	√
			7. Pelatihan pengadaan barang dan jasa	3 orang	√		√		√
			8. Bimtek SOP pengelolaan kawasan	10 SOP/Seluruh staf	√	√	√	√	√
			9. Pelatihan dasar-dasar konservasi (MPA 101)	10 orang	√		√		√
3	Pengembangan sarana dan prasarana	a.	Pengkajian kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan	1 dokumen		√			
		b.	Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan KKP	paket	√	√	√	√	√
		c.	Pemeliharaan sarana dan prasarana	paket	√	√	√	√	√
4	Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan untuk mendukung UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat	a.	Kajian model pendanaan berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan KKP Raja Ampat	1 dokumen		√			
		b.	Penyusunan rencana strategis sistem pendanaan berkelanjutan	1 dokumen			√		
		c.	Pengembangan kemitraan dengan lembaga-lembaga donor	2 kali/tahun	√	√	√	√	√
5	Implementasi pengelola jejaring sasi dan pengelola jejaring Kawasan Konservasi Perairan di Bentang Laut Kepala Burung di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya	a.	Koordinasi dan fasilitasi pertemuan berkala kelembagaan jejaring pengelola sasi dan pengelola jejaring kawasan konservasi perairan	1 kali/tahun	√	√	√	√	√
		b.	Lokakarya pengelola pengelola jejaring sasi dan pengelola jejaring KKP di Bentang Laut Kepala Burung	1 kali/tahun		√	√	√	√
		c.	Penguatan pengelola sasi	1 kali/2 tahun		√		√	
6	Komunikasi dan publikasi	a.	Penyusunan dan diseminasi materi-materi publikasi	1 paket/tahun	√	√	√	√	√
		b.	Kerja sama peliputan media lokal dan/atau nasional mengenai Taman di Perairan Raja Ampat	2 kali/tahun	√	√	√	√	√
		c.	Pengelolaan <i>website</i> dan akun media sosial KKP Kepulauan Raja Ampat	12 bulan	√	√	√	√	√
		d.	Pembuatan ruangan Informasi tentang kawasan	9 lokasi	√	√	√	√	√
		e.	Materi audio visual	1 paket					

II.	Penguatan Pengelolaan Sumber Daya				1. Video profil kawasan	1 paket		√			
					2. Materi promosi layanan	1 paket			√		
					3. Video profil SUOP	1 paket		√			
		7	Koordinasi dan sinkronisasi program	a	Pertemuan dengan mitra kerja	4 kali/tahun	√	√	√	√	√
		1	Terlindunginya habitat dan populasi Ikan	a.	Penetapan tata batas KKP Kepulauan Raja Ampat	7 area/2 kali		√			
				b.	Sosialisasi perlindungan habitat, jenis ikan dan genetik ikan, serta program kerja terkait	7 area/7 kali/tahun	√	√	√	√	√
				c.	Sosialisasi sistem zonasi dan peruntukannya, serta program kerja terkait	7 area/7 kali/tahun	√	√	√	√	√
				d.	Menyusun strategi pengelolaan perikanan berkelanjutan	1 dokumen		√			
				e.	Identifikasi/pengukuran hasil tangkapan nelayan	1 kali/12 bulan	√	√	√	√	√
		2	Rehabilitasi ekosistem perairan serta biota penting	a	Rehabilitasi ekosistem pesisir dan/atau perairan	1 kali/area/2 tahun	√	√	√	√	√
				b	<i>Restocking</i> biota ikonik/terancam punah	1 kali/tahun	√	√	√	√	√
				c	Sosialisasi <i>restocking</i>	3 Area		√	√	√	√
		3	Edukasi, kerja sama lembaga penelitian/ perguruan tinggi/mitra lainnya	a.	Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga riset lokal dan internasional untuk bersama-sama melakukan penelitian di KKP Kepulauan Raja Ampat	1 kali/tahun	√	√	√	√	√
				b.	Pengumpulan data hasil, laporan dan publikasi penelitian	1 kali/tahun	√	√	√	√	√
				d.	Kajian daya dukung lokasi pemanfaatan tinggi di kawasan konservasi	dokumen		√		√	
		4	Pemanfaatan KKP	a.	Menyusun SOP pemanfaatan sumber daya perikanan	1 kali / tahun	√		√	√	√
				b.	Menyusun SOP dan <i>code of conduct</i> pemanfaatan situs selam dan habitat penting lainnya	1 kali / tahun	√		√	√	√
				c.	Penyusunan SOP pelaku pemandu selam dalam KKP	1 kali / tahun	√	√	√	√	√
				d.	Penyusunan SOP Sispendalwas dan RAMS	1 dokumen	√	√			

		e.	Sertifikasi standar kependudukan pemanfaatan KKP	20 orang / tahun	√		√	√	√
		f.	Apresiasi/penghargaan pengguna kawasan konservasi bagi pemanfaat jasa lingkungan	1 kali/tahun	√	√	√	√	√
5	Jaga Laut	a.	Patroli pemanfaatan kawasan	8 kali / bulan/pos	√	√	√	√	√
		b.	Kolaborasi penyusunan SOP dan tindak lanjut pengawasan pemanfaatan kawasan dengan pihak terkait	1 dokumen		√			
		c.	koordinasi pengawasan pemanfaatan kawasan dengan pihak terkait	4 kali / tahun	√	√	√	√	√
6	Pengelolaan spesies yang dilindungi	a.	Berkoordinasi dengan instansi terkait data populasi biota dilindungi	2 kali/tahun	√	√	√	√	√
		b.	Sosialisasi biota dilindungi dan program kerja terkait, bekerja sama dengan mitra	1 kali/area/tahun	√	√	√	√	√
		c.	Adopsi regulasi biota dilindungi ke regulasi tingkat provinsi	dokumen		√			
7	Spesies introduksi atau invasif	a.	Menjalin koordinasi dengan mitra dan lembaga yang berwenang	2 kali/tahun		√	√	√	√
		b.	Melakukan pemantauan dan pendataan biota invasif bersama mitra	1 kali/tahun		√	√	√	√
		c.	Melaksanakan tindakan pencegahan penyebaran biota invasif di perairan bersama mitra	1 kali/tahun		√	√	√	√
		d.	Membuat bahan publikasi ancaman dan penanganan biota invasif bersama mitra	1 kali/2 tahun		√		√	
8	Perikanan budi daya perairan dan perikanan tangkap	a.	Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait kegiatan budi daya perairan dan penangkapan ikan di KKP Kepulauan Raja Ampat	1 kali/tahun		√	√	√	√
		b.	Pemantauan dan pengawasan kegiatan budi daya perairan dan kegiatan penangkapan ikan	2 kali/tahun		√	√	√	√
		c.	Pendataan dan penandaan perahu nelayan tradisional	1 kali/tahun	√	√	√	√	√
9	Mitigasi degradasi lingkungan akibat pembangunan di pesisir dan laut	a.	Berkoordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait perihal rencana pembangunan di wilayah konservasi	1 kali/tahun	√	√	√	√	√
		b.	Sosialisasi dengan <i>stakeholder</i> terkait perihal rencana kegiatan yang akan di	1 kali/tahun	√	√	√	√	√

III.	Penguatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di kawasan				lakukan dalam KKP yang berdampak langsung bagi kawasan						
		10	Adaptasi perubahan iklim	a.	Koordinasi dan kerja sama dengan <i>stakeholder</i> terkait perihal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1 kali/tahun		√	√	√	√
		1	Pendidikan lingkungan hidup	a.	Melaksanakan pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat di kawasan	2 kali/area/tahun	√	√	√	√	√
				b.	Koordinasi dengan mitra terkait kerja sama pendidikan lingkungan hidup	2 kali/tahun	√	√	√	√	√
				c.	Pelatihan pelaksanaan kurikulum muatan lokal ke berbagai tingkat lembaga pendidikan melalui kerja sama dengan mitra	1 kali/tahun		√	√	√	√
				d.	Pelatihan dasar-dasar konservasi (MPA 101) bagi masyarakat bersama mitra	1 kali/tahun		√	√	√	√
				e.	Bantuan biaya pendidikan bagi generasi muda dalam kawasan konservasi	1 kali/2 tahun	√		√		√
				f.	Penyelenggaraan kegiatan rumah edukasi konservasi	setiap tahun		√	√	√	√
		2	Pemberdayaan/penguatan kelembagaan masyarakat dalam kawasan	a.	Koordinasi dengan mitra terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan	1 kali/area/tahun	√	√	√	√	√
				b.	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat	2 kali/tahun	√	√	√	√	√
				c.	Peningkatan kapasitas kelompok perempuan	2 kali/tahun	√	√	√	√	√
				d.	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penyusunan peraturan adat dan kebijakan kampung terakit pemanfaatan KKP	1 kali/tahun	√	√	√	√	√
				e.	Penguatan budaya masyarakat dalam mendukung pengelolaan KKP	1 kali/tahun	√	√	√	√	√
		3	Pengembangan usaha ekonomi masyarakat	a	Pemberian bantuan sarana dan prasarana melalui mekanisme kampung/kelompok yang transparan	1 kali/area/tahun	√	√	√	√	√
				b.	Koordinasi dengan mitra terkait identifikasi dan perencanaan pengembangan usaha masyarakat	1 kali/tahun	√	√	√	√	√
				c.	Pendampingan kelompok usaha ekonomi masyarakat bersama mitra	area/tahun	√	√	√	√	√
				d.	Pengembangan sistem pemasaran (<i>outlet</i> , promosi)	1 kali/tahun	√	√	√	√	√

				e.	Evaluasi efektivitas manajemen usaha masyarakat	1 kali/tahun	√	√	√	√	√
IV	Penguatan Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi	1.	Pemantauan dan evaluasi kelembagaan pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat	a.	Pemantauan dan evaluasi kesesuaian lembaga atau struktur organisasi, kompetensi SDM, ketersediaan sarana dan prasarana, kemitraan pengelolaan kawasan dan kesesuaian pendanaan untuk menjalankan organisasi dan/atau fungsi pengelolaan	1 kali/tahun	√	√	√	√	√
				b.	Pemantauan dan evaluasi kesesuaian pendanaan untuk kebutuhan pengelolaan kawasan	1 kali/tahun	√	√	√	√	√
		2.	Pemantauan dan evaluasi pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di KKP Kepulauan Raja Ampat	a.	Pemantauan dan evaluasi sistem dan pelaksanaan pengawasan berbasis masyarakat	1 kali/tahun		√	√	√	√
				b.	Pemantauan dan evaluasi sistem dan pelaksanaan pengawasan terpadu	2 kali/tahun		√	√	√	√
				c.	Pemantauan dan evaluasi kepatuhan aturan (<i>compliance</i>) zonasi berdasarkan pemantauan pemanfaatan sumber daya (<i>resources use monitoring</i> - RUM)	1 kali/tahun		√	√	√	√
				d.	Membangun kerja sama antara pengelola kawasan dengan penegak hukum terkait pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di KKP Kepulauan Raja Ampat	dokumen		√			
				e.	Membangun kerja sama dengan mitra pengelola kawasan lainnya di perairan Raja Ampat	dokumen	√	√			
		3	Pemantauan dan evaluasi kondisi sumber daya alam dan sosial ekonomi	a.	Pemantauan dan evaluasi kondisi sumber daya pesisir dan laut	2 kali/tahun		√	√	√	√
				b.	Pemantauan dan evaluasi persepsi masyarakat tentang KKP Kepulauan Raja Ampat	1 kali/2 tahun		√		√	
				c.	Pemantauan dan evaluasi manfaat sosial ekonomi KKP Kepulauan Raja Ampat bagi masyarakat sekitar kawasan	1 kali/2 tahun		√		√	
		4	Pemantauan dan pengendalian pengguna KKP Kepulauan Raja Ampat	a.	Pengecekan kartu tarif retribusi layanan kawasan konservasi	Setiap bulan	√	√	√	√	√
				b.	Pemantauan dan pengendalian armada dan alat tangkap	1 kali/tahun		√	√	√	√
				c.	Pemantauan dan evaluasi dampak kegiatan pemanfaatan terhadap Kawasan	1 kali/tahun		√	√	√	√

			d.	Pemantauan dan pengendalian sarana wisata bahari	1 kali/tahun		√	√	√	√
		5	a.	Pertemuan para mitra dan pra-EVIKA	3 kali/tahun	√	√	√	√	√
			b.	Pengumpulan dokumen	1 kali/tahun	√	√	√	√	√
			c.	Penerapan bertahap IUCN Green List	1 kali/tahun	√	√	√	√	√
			d.	Pelaksanaan EVIKA	1 kali/tahun	√	√	√	√	√

BAB IV PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA DAN RENCANA PENCAPAIAN LIMA (5) TAHUN

4.1 Pengukuran Capaian Kinerja

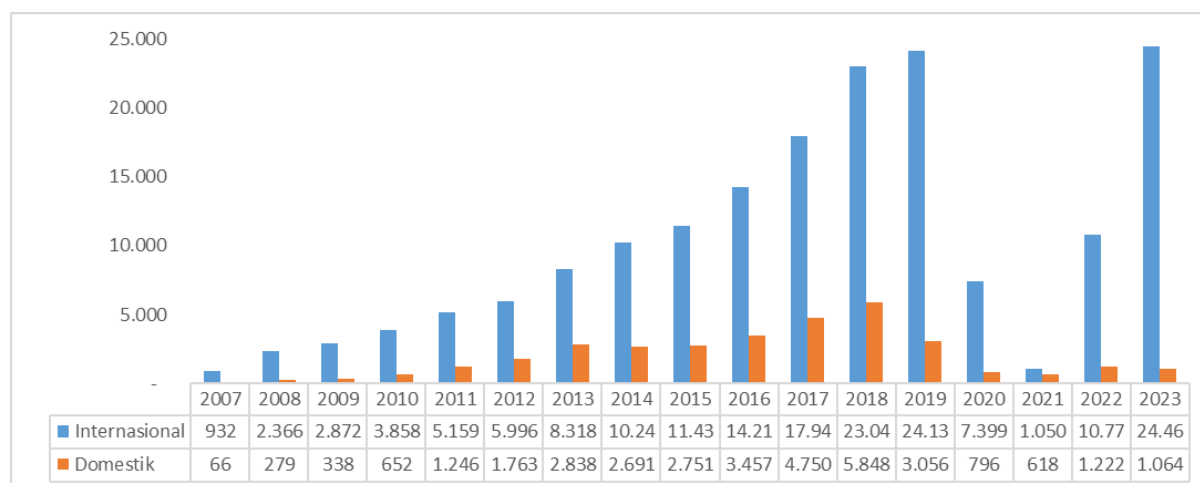
Indikator merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat memerlukan penetapan indikator-indikator yang sesuai dan terkait dengan informasinya.

Indikator-indikator kinerja yang digunakan dibuat dengan memerhatikan faktor relevansi, pendefinisian yang baik, dapat diukur, sesuai, akurat, dapat divalidasi dan kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Untuk memudahkan melihat keterkaitan ukuran yang digunakan dan target kinerja yang ingin dicapai, maka indikator-indikator tersebut akan ditampilkan bersamaan pada Tabel 4 untuk rencana pencapaian 5 tahun.

4.2 Pencapaian Kegiatan Sejak Dibentuk

Sebelum UU No. 23 tahun 2014 diterapkan, UPTD ini merupakan unit kerja di bawah pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat. Salah satu pencapaian yang paling terlihat adalah meningkatnya kunjungan pemanfaat jasa lingkungan yang menikmati keindahan alam KKP Kepulauan Raja Ampat. Perkembangan jumlah pemanfaat jasa lingkungan yang membayar tarif retribusi layanan kawasan konservasi adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Grafik jumlah pemanfaat jasa lingkungan KKP Kepulauan Raja Ampat (wisata bahari) tahun 2007–2023.

Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa kinerja UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat sangat baik. Total pemanfaat jasa lingkungan meningkat dari hanya 7.759 orang di tahun 2012 menjadi 27.187 orang di tahun 2019. Dalam kurun waktu lima tahun, jumlah wisatawan yang datang meningkat hampir tiga kali dengan rata-rata pertumbuhan 25% per tahun.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa 1) UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat berhasil melakukan pungutan sehingga jumlah pemanfaat jasa lingkungan semakin banyak dan 2) minat pemanfaat jasa lingkungan meningkat karena kawasan ini dijaga dengan baik oleh UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

Dari sisi komposisi wisatawan dapat terlihat bahwa sampai saat ini wisatawan asing atau wisatawan internasional masih mendominasi kunjungan ke KKP Kepulauan Raja Ampat. Pada tahun 2017 jumlah pemanfaat jasa lingkungan internasional berjumlah 24.131 orang berbanding 4.750 orang pemanfaat domestik. Sejak tahun 2012, pemanfaat jasa lingkungan internasional maupun domestik tumbuh sekitar 25% per tahun.

4.3 Rencana Pencapaian Tiga (3) Tahun Mendatang

Rencana pencapaian program atau target kinerja dibuat sesuai dengan indikator kinerja yang disepakati. Target kinerja menunjukkan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam periode waktu 3 tahun. Rencana pencapaian layanan UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat per tahun untuk lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rencana Pencapaian Program UPTD Pengelolaan Kepulauan Raja Ampat tahun 2024-2026

No.	Strategi	Kegiatan		Uraian Kegiatan		Indikator Kinerja	RPD Periode Tahun 2024-2026		
							1	2	3
I.	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola dan Para Pihak	1	Pemantapan UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sebagai unit organisasi pengelola	a.	Inisiasi penyusunan peraturan	Kali	√	√	√
				b.	Pengembangan struktur organisasi UPTD dan rekrutmen staf:	Kali	√	√	√
				1.	Pembentukan seksi wilayah pengelola kawasan	2 seksi wilayah	√		
				2.	Pembentukan koordinator kawasan di bawah seksi wilayah	7 koordinator Kawasan	√		
				3.	Penyediaan sarana Pos Pengelola	5 pos	√	√	√
				4.	Rekrutmen Staf	10 org	√		
				5.	Penyesuaian struktur lembaga Pengelola	1 Dokumen		√	
				c.	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi	Kali	√		
		2	Peningkatan kapasitas pengelola UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat	a.	Pelatihan Dasar Dasar Konservasi (MPA 101)	30 orang	√	√	√
				b.	Sertifikasi profesi pengelola kawasan konservasi	30 orang	√	√	√
				c.	Pelatihan staf UPT Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat				
					1. Penguatan personil tim jaga laut	3 kali pelatihan, 47 orang	√		√

					2. Pelatihan tim pemantauan SDAL	3 kali pelatihan, 10 orang	√		√
					3. kursus bahasa Asing	6 orang	√	√	√
					4. pelatihan pengelolaan data dan informasi	6 orang	√	√	√
					5. Bimtek BLUD	4 orang	√	√	√
		3	Pengembangan sarana dan prasarana	a.	Penyusunan dokumen kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan	1 dokumen	√	√	√
				b.	Pengadaan sarana dan prasarana	PAKET			
					1. sarana dan prasarana Perkantoran	Paket	√	√	√
					2. Sarana dan prasarana Pengawasan	paket	√	√	√
					3. Sarana dan prasarana Pemantauan biofisik	paket	√	√	√
					4. Sarana dan Prasarana Pelayanan Kartu Jasa Lingkungan (KJL)	paket	√	√	√
					6. Sarana dan Prasarana Komunikasi	paket	√	√	√
					7. Sarana dan Prasarana Unit Bisnis	paket	√	√	√
				c.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan	Paket	√	√	√
		4	Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan	a.	Pengkajian kebutuhan dan peluang pendanaan berkelanjutan pengelolaan kawasan	1 dokumen	√	√	√
				b.	Penyusunan rencana strategis sistem pendanaan berkelanjutan pengelolaan kawasan	1 dokumen			√
				c.	Pengembangan kemitraan dengan lembaga-lembaga donor.	2 kali / tahun	√	√	√
		5	Implementasi jejaring Kawasan Konservasi di bentang laut kepala burung di Provinsi Papua dan Papua Barat Daya	a	Koordinasi dan fasilitasi pertemuan berkala kelembagaan Jejaring kawasan konservasi .	1 kali / tahun	√	√	√
				b.	Pelaksanaan program/kegiatan jejaring KKP Raja Ampat	1 kali / tahun	√	√	√
		6	Komunikasi dan publikasi	a.	Penyusunan dan diseminasi materi-materi publikasi	1 paket/ tahun	√	√	√
				b.	Kerjasama peliputan media local dan nasional mengenai TWP Raja Ampat	1 kali/tahun	√	√	√

				c.	Pengelolaan website TWP Raja Ampat	12 bulan	√	√	√
				d.	Pembuatan database dan pusat informasi.	7 lokasi	√	√	√
		7	Koordinasi dan Sinkronisasi Program	a	pertemuan dengan mitra kerja	4 kali / tahun	√	√	√
II.	Penguatan Pengelolaan Sumber daya	1	Terlindungnya Habitat dan populasi Ikan	a.	Inisiasi tata batas KKP	kaswasan	-	√	√
				b.	Sosiasiasi Perlindungan habitat dan jenis ikan	7 area kali/ tahun	√	√	√
				c.	Sosialisasi sistem zonasi dan Peruntukannya	7 area / kali / tahun	√	√	√
		2	rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut serta biota penting	a	Rehabilitasi ekosistem Terumbu Karang	1 kali / area / 2 tahun	√		√
				b	Restocking biota ikonik	1 kali / tahun			
				c	Sosialisasi restocking	3 Area			√
		3	koordinasi lembaga penelitian/ perguruan tinggi/mitra lainnya	a.	Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga riset lokal dan internasional untuk bersama-sama melakukan penelitian di daerah konservasi,	1 kali / tahun	√	√	√
				b.	pengumpulan data hasil, laporan dan publikasi penelitian	1 kali / tahun	√	√	√
		4	Ekowisata dan Jasa Lingkungan	a.	menyusun standar pemanfaatan kawasan untuk wisata bahari	1 kali / tahun	√		√
				b.	menyusun <i>code of conduct</i> usaha jasa lingkungan	1 kali / tahun	√		√
				c.	sertifikasi konservasi pelaku usaha jasa lingkungan	1 kali / tahun	√	√	√
				d.	kajian daya dukung lokasi pemanfaatan tinggi di kawasan konservasi	1 dokumen	√		√
				e.	kepatuhan standar lingkungan untuk resort, hotel, homestay, dan infrastruktur wisata bahari yang ada	5%/tahun	√	√	√
				f.	apresiasi pengguna kawasan konservasi bagi pemanfaat jasa lingkungan	1 kali / tahun	√	√	√
		5	Pengawasan	a.	pengawasan pemanfaatan kawasan	3 hari / pekan / sektor	√	√	√

				b.	kolaborasi penyusunan Standar Prosedur Operasi dan tindak lanjut pengawasan pemanfaatan kawasan dengan pihak terkait	1 dokumen			√
				c.	koordinasi pengawasan pemanfaatan kawasan dengan pihak terkait	4 kali / tahun	√	√	√
		6	Pengelolaan Spesies Yang Dilindungi	a.	berkoordinasi dengan instansi terkait data populasi Biota dilindungi	2 kali / tahun	√	√	√
				.b	Sosialisasi biota dilindungi bekerjasama dengan mitra	1 kali / area / tahun	√	√	√
		7	Spesis Introduksi atau Invasif	a.	Menjalin koordinasi dengan Lembaga yang berwenang	2 kali / tahun	√		√
				b.	melakukan pemantauan dan pendataan biota invasif bersama mitra	1 kali / tahun	√	√	√
				c.	melaksanakan tindakan pencegahan penyebaran biota invasif di perairan bersama mitra	1 kali / tahun	√	√	√
				d.	membuat bahan publikasi ancaman dan penanganan biota invasif bersama mitra	1 kali /2 tahun	√		√
		8	Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	a.	koordinasi dengan stakeholder terkait tentang kegiatan budidaya laut dan Penangkapan ikan di KKP	1 kali / tahun	√	√	√
				b.	Pemantauan dan Pengawasan kegiatan Budidaya Laut dan Kegitan Penangkapan Ikan	1 kali / tahun	√	√	√
				c.	Pendataan dan Penandaan perahu nelayan tradisional	1 kali / tahun	√	√	√
		9	mitigasi degradasi lingkungan akibat pembangunan di pesisir dan laut	a	berkoordinasi dengan stakeholder terkait perihal rencana pembangunan di wilayah konservasi	1 kali / tahun	√	√	√
				b.	Sosialisasi dengan stakeholder terkait perihal rencana kegiatan yang akan di	1 kali / tahun	√	√	√
					lakukan dalam KKP yang berdampak langsung bagi kawasan				
				10	Adaptasi Perubahan Iklim	a.	koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder terkait perihal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1 kali / tahun	√
III.	Penguatan sosial, ekonomi, dan budaya	1	Pendidikan lingkungan hidup	a.	Melaksanakan pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat di kawasan	2 kali / area / tahun	√	√	√

	masyarakat di kawasan			b.	koordinasi dengan mitra terkait kerjasama pendidikan lingkungan hidup	2 kali / tahun	√	√	√
				c.	Pelatihan pelaksanaan kurikulum muatan local keberbagai tingkat lembaga pendidikan melalui kerjasama dengan mitra	1 kali / tahun			
				d.	pelatihan dasar-dasar konservasi (MPA 101) bagi masyarakat bersama mitra	1 kali / area / tahun			
		2	Pemberdayaan masyarakat di kawasan	a.	koordinasi dengan mitra terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan	1 kali / area / tahun	√	√	√
				b.	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat bersama mitra	1 kali / area	√	√	√
				c.	Peningkatan kapasitas kelompok perempuan bersama mitra	1 kali / area	√	√	√
		3.	Pengembangan Usaha Masyarakat	a	pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi	1 kali / area / tahun			√
				b.	berkoordinasi dengan mitra terkait rencana pengembangan usaha masyarakat	1 kali / tahun	√	√	√
				c.	pendampingan penyiapan produk hasil kelompok usaha	1 kali / area/ tahun	√	√	√
				d.	pengembangan sistem pemasaran (outlet, promosi)	1 kali / tahun	√	√	√
				e.	evaluasi efektifitas manajemen usaha masyarakat	1 kali / tahun	√	√	√
		4.	Dana Jasa Pemeliharaan Lingkungan	a	Inisiasi peraturan Gubernur	1 Dokumen	√	√	
				b.	Sosialisasi mekanisme pengusulan dan penyaluran Dana Jasa Pemeliharaan lingkungan	1 kali / area/ tahun	√	√	√
				c.	Penyaluran Dana Jasa Pemeliharaan lingkungan	1 kali / area / tahun	√	√	√
				d.	evaluasi pemanfaatan Dana Jasa Pemeliharaan lingkungan	1 kali / tahun	√	√	√
IV	Penguatan Pengawasan, Evaluasi dan Pemantauan SDA	1.	Pemantauan dan evaluasi kelembagaan pengelolaan KKP Raja Ampat	a.	Pemantauan dan evaluasi kesesuaian lembaga atau struktur organisasi, Kompetensi SDM, ketersediaan SARPRAS, Kemitraan pengelolaan kawasan dan kesesuaian pendanaan untuk menjalankan organisasi dan/atau fungsi pengelolaan.	1 kali / 1 - 5 tahun			√

			b.	Pemantauan dan evaluasi kesesuaian pendanaan untuk kebutuhan pengelolaan kawasan	1 kali / tahun	√	√	√
		2.	a.	Pemantauan dan evaluasi sistem dan pelaksanaan pengawasan berbasis masyarakat	1 kali / tahun		√	√
			b.	Pemantauan dan evaluasi sistem dan pelaksanaan pengawasan terpadu	1-2 kali / tahun		√	√
			c.	Pemantauan dan evaluasi kepatuhan aturan (compliance) zonasi berdasarkan pemantauan pemanfaatan sumberdaya (resources use pemantauan - RUM)	1 kali / tahun		√	√
		3	a.	Pemantauan dan evaluasi kondisi sumberdaya pesisir dan laut	6 bulan/ area		√	√
			b.	Pemantauan dan evaluasi persepsi masyarakat tentang TWP Raja Ampat	1 kali / tahun		√	
			c.	Pemantauan dan evaluasi manfaat social ekonomi TWP Raja Ampat bagi masyarakat sekitar kawasan	1 kali / tahun		√	
		4	a.	Pemantauan jumlah kedatangan wisatawan dan pendapatan dari kegiatan wisata bahari	/bulan		√	√
			b.	Pemantauan distribusi hasil sistem tarif masuk	1 kali / tahun			
			c.	Pemantauan dan evaluasi dampak kegiatan wisata bahari terhadap kawasan	1 kali / tahun		√	√
		5	a.	Evaluasi efektivitas pengelolaan dan dokumen rencana pengelolaan KKP Raja Ampat	1 kali / tahun		√	√

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBIAYAAN

5.1 Rencana Biaya Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat

Rencana biaya UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat selama 3 tahun (2020–2022) mengacu pada Standar Biaya Umum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 5. Rencana biaya pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat (Tidak Termasuk Gaji PNS)

	2024	2025	2026	2027	2028
RENCANA BIAYA BERDASARKAN ALOKASI BIAYA					
Biaya Operasional KKP R4 :					
A. Biaya Pelayanan	21,033,901,659	21,454,579,692	22,098,217,083	22,982,145,766	24,131,253,055
B. Biaya Umum dan Administrasi	7,213,200,000	7,357,464,000	7,578,187,920	7,881,315,437	8,275,381,209
Biaya Non-operasional	-	-	-	-	-
Biaya Pengeluaran Investasi	602,085,614	614,127,326	632,551,146	657,853,192	690,745,852
Total	28,849,187,273	29,426,171,018	30,308,956,149	31,521,314,395	33,097,380,115
RENCANA BIAYA BERDASARKAN PROGRAM STRATEGIS					
Penguatan kapasitas kelembagaan pengelola dan para pihak	17,140,090,273	17,482,892,078	18,007,378,841	18,727,673,994	19,664,057,694
Penguatan Pengelolaan Sumber daya	9,907,190,000	10,105,333,800	10,408,493,814	10,824,833,567	11,366,075,245
Penguatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dalam wilayah kawasan konservasi perairan	1,630,345,000	1,662,951,900	1,712,840,457	1,781,354,075	1,870,421,779
Pemantauan SDA, pengendalian dan evaluasi	171,562,000	174,993,240	180,243,037	187,452,759	196,825,397
Total	28,849,187,273	29,426,171,018	30,308,956,149	31,521,314,395	33,097,380,115
RENCANA BIAYA BERDASARKAN SITUS KAWASAN					
Kantor UPTD PENGELOLAAN Kepulauan Raja Ampat	23,971,777,273	24,451,212,818	25,184,749,203	26,192,139,171	27,501,746,130
Area I Ayau Asia	502,700,000	512,754,000	528,136,620	549,262,085	576,725,189
Area II Teluk Mayalibit	491,490,000	501,319,800	516,359,394	537,013,770	563,864,458
Area III Selat Dampier	1,553,120,000	1,584,182,400	1,631,707,872	1,696,976,187	1,781,824,996
Area IV Misool	472,700,000	482,154,000	496,618,620	516,483,365	542,307,533
Area V Kofiau & Boo	477,700,000	487,254,000	501,871,620	521,946,485	548,043,809
Area VI Kep. Fam	473,300,000	482,766,000	497,248,980	517,138,939	542,995,886
Area VII Misool Bagian Utara	906,400,000	924,528,000	952,263,840	990,354,394	1,039,872,113
Total	28,849,187,273	29,426,171,018	30,308,956,149	31,521,314,395	33,097,380,115

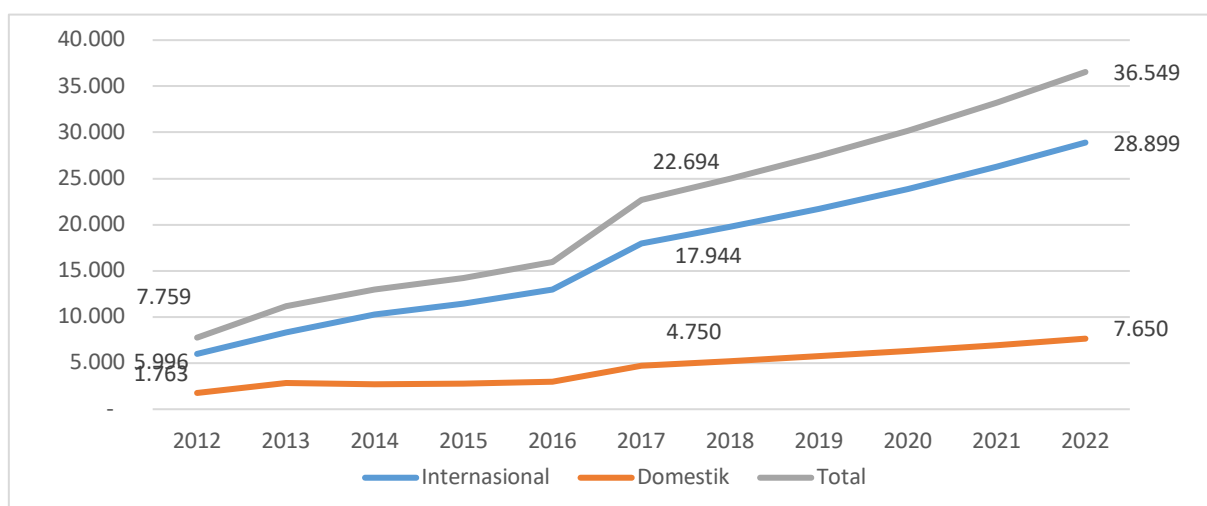
5.2 Sumber Dana Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat

Dalam mengupayakan tersedianya dana pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat, mekanisme pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi sebuah mekanisme yang tepat agar dapat menerima, mengelola, dan menyalurkan berbagai dana pengelolaan baik yang bersumber dari APBN, APBD, dana bantuan dari donor, maupun dana-dana yang diperoleh dari kegiatan BLUD di KKP Kepulauan Raja Ampat. Saat ini sumber pendanaan utama untuk pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat bersumber dari tarif retribusi layanan kawasan konservasi, hibah dari mitra-mitra pembangunan, serta pendanaan dari APBD.

5.2.1 Tarif Retribusi Layanan Kawasan Konservasi (Jalasasi)

Sejak tahun 2015, tarif retribusi layanan kawasan konservasi telah dikelola oleh BLUD UPTD Pengelolaan Kepulauan Raja Ampat. Pendapatan ini merupakan Pendapatan Asli Daerah yang digolongkan sebagai PAD lain-lain, yang dikelola, dikumpulkan dan digunakan secara langsung untuk membiayai operasional UPTD dalam pemeliharaan KKP Kepulauan Raja Ampat, dan status BLUD yang disandang oleh UPTD Pengelolaan Kepulauan Raja Ampat yang melegalkan hal tersebut. Pendapatan inilah yang menjadi sumber utama untuk pembiayaan pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

Berdasarkan data kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal, ada kecenderungan peningkatan jumlah kunjungan yang cukup signifikan. Sejak tahun 2012 pengunjung naik secara drastis dengan peningkatan rata-rata 25% per tahun. Pada tahun 2019, total kunjungan wisatawan telah mencapai 27.187 wisatawan. Diproyeksikan pada tahun 2022, jumlah wisatawan yang datang mencapai 36,549 wisatawan. Angka ini merupakan estimasi yang sangat konservatif dengan peningkatan tahunan sebesar 10% per tahun. Proyeksi ini menjadi dasar bagi perkiraan pendapatan UPTD dari Jalasasi.



Gambar 1. Data dan proyeksi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik di tahun 2012 - 2022

Tarif retribusi layanan kawasan konservasi yang harus dibayarkan oleh setiap wisatawan sekarang ini adalah Rp. 1.000.000 untuk wisatawan mancanegara dan Rp. 500.000 untuk wisatawan domestik.

Dengan demikian, berdasarkan proyeksi jumlah wisatawan yang akan datang seperti pada Gambar 1 di atas maka pendapatan dari tarif retribusi layanan kawasan konservasi untuk tahun 2025–2029 dapat diproyeksikan sebagai berikut:

	2024	2025	2026	2027	2028
Jumlah Wisatawan					
Internasional	24,464	27,937.89	29,362.72	30,566.59	32,125.49
Domestik	1,064	1,215.09	1,277.06	1,329.42	1,397.22
Total	25,528	29,153	30,640	31,896	33,523
Pendapatan					
Internasional	24,464,000,000.00	27,937,888,000.00	29,362,720,288.00	30,566,591,819.81	32,125,488,002.62
Domestik	532,000,000.00	1,215,088,000.00	638,528,744.00	664,708,422.50	698,608,552.05
Total	24,996,000,000.00	29,152,976,000.00	30,001,249,032.00	31,231,300,242.31	32,824,096,554.67

Tabel 7. Proyeksi Pendapatan Tarif Retribusi Layanan Kawasan Konservasi

5.2.2 Hibah

Dukungan dari pihak donor masih sangat dibutuhkan, dan UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat memiliki tanggung jawab untuk mendapatkan dukungan finansial dari donor. UPTD dibolehkan mengajukan permohonan bantuan dana ke pihak donor, baik itu secara langsung ataupun melalui LSM yang ingin membantu pengelolaan kawasan konservasi di Raja Ampat.

Perolehan status Badan Layanan Umum Daerah telah menciptakan kondisi yang memungkinkan UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sebagai lembaga pengelola dapat menerima hibah langsung dan juga melakukan perjanjian dengan pihak donor. Ini adalah kondisi ideal yang diharapkan, namun pilihan-pilihan lain juga dapat dicari untuk memungkinkan dan memastikan dukungan donor dapat terus berlanjut untuk kawasan konservasi Raja Ampat.

Dana Perwalian Blue Abadi Fund (BAF) merupakan dana perwalian yang dibangun oleh konsorsium donor dan LSM pendamping (KI, YKAN, WWF dan Starling Resources) untuk mendukung pendanaan berkelanjutan bagi pengelolaan kawasan konservasi di Bentang Laut Kepala Burung. Saat ini dana perwalian tersebut telah berjalan dan dikelola secara administratif oleh Yayasan KEHATI Indonesia.

Kawasan konservasi perairan Kepulauan Raja Ampat merupakan kawasan konservasi yang termasuk dalam kawasan yang mendapat dana secara kontinyu dari BAF. Namun, penggunaan dana harus transparan dan akuntabel serta memenuhi misi dari BAF. Pada tahun 2019, dana perwalian dari BAF diharapkan sudah dapat mendukung kegiatan pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

Selain Blue Abadi, UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat diharapkan juga untuk melakukan diversifikasi pendapatan dari hibah dengan berupaya mencari donor-donor lain selain BAF. UPTD dituntut untuk kreatif mengembangkan program-program andalan agar dapat didanai oleh sumber-sumber lain baik hibah perorangan maupun hibah dari lembaga, baik berasal dari Indonesia maupun dari negara lain. Hibah juga tidak terbatas dalam bentuk uang, namun dapat juga dalam bentuk barang-barang yang bermanfaat bagi pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

Tabel 8. Proyeksi Perolehan Hibah UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat tahun 2024–2028

Sumber Hibah	2024	2025	2026	2027	2028
BAF	4,762,744,444	277,255,556	277,255,556	277,255,556	277,255,556
CII/WFF	-	-	-	-	-
Sumber Hibah Lain				-	-
Total	4,762,744,444.00	277,255,556.00	277,255,556.00	277,255,556.00	277,255,556.00

5.2.3 Pendapatan APBD dan lainnya.

Dari kedua sumber pendanaan utama yang telah dikemukakan sebelumnya, masih terdapat kekurangan untuk pembiayaan pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat. Kekurangan tersebut diharapkan dapat ditanggulangi oleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dan juga dari pendapatan-pendapatan lainnya.

5.2.3.1 APBD

Pemerintah Papua Barat Daya sebagai penanggung jawab utama dalam pemberian layanan melalui UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan dana layanan tersebut, dan sebagai lembaga pemerintah diharapkan akan terus mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat secara signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Dana alokasi anggaran pemerintah adalah kunci keberhasilan untuk melanjutkan upaya konservasi di Raja Ampat dan juga untuk menyakinkan pihak donor akan keseriusan pemerintah Papua Barat Daya dalam konservasi alam lautnya, sehingga investasi yang telah dan akan donor berikan tidak akan sia-sia dan akan terus berlanjut untuk memastikan usaha konservasi terus berjalan sampai tercapainya kemandirian dalam pendanaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

Alokasi anggaran dari pemerintah tentu harus sesuai dengan kemampuan dana dan kebijakan pemerintah, namun mengingat bahwa sektor utama pengembangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya adalah perikanan dan kelautan, serta wisata bahari maka peningkatan alokasi anggaran untuk UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat diharapkan akan terus meningkat sampai dengan tercapainya kemandirian penuh.

Tabel 9. Proyeksi perolehan hibah UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat tahun 2025-2029

Sumber Hibah	2024	2025	2026	2027	2028
APBD Provinsi Papua Barat Daya					
a. Diving Set					
b. BBM					
c. Pos Pengawasan					
d. Jetty					
e. Speedboat					
f. Peralatan Jaga Laut (Drone)					

5.2.3.2 Sumber Pendanaan Lainnya

Selain dari APBD, untuk menutupi kekurangan pembiayaan pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat perlu diupayakan untuk memperoleh dukungan pembiayaan dari sumber-sumber lain, antara lain: dukungan swasta, masyarakat dan lainnya.

5.2.3.2.1 Lembaga Non-pemerintah

Lembaga-lembaga non-pemerintah ataupun swasta dapat berpartisipasi dalam memberikan dukungan dalam pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat baik berupa pembiayaan maupun program/ kerja sama.

UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat harus melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan dukungan melalui kerja sama, baik itu berupa pemberian dana oleh perseroan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau dengan menyerahkan sebagian kegiatan-kegiatan sosial dan lingkungan milik UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat untuk dikerjakan atau dibiayai oleh perseroan.

Mengingat kesamaan tanggung jawab dalam wilayah yang sama, yang tentunya jika dilakukan secara terkoordinasi dengan baik dipercaya akan menghasilkan dampak yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi perseroan apa saja yang beroperasi di Raja Ampat, agar UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat bisa melakukan pendekatan dan bekerja sama.

5.2.3.2.2 Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam mengelola kawasan konservasi tentu memberikan sumbangsih yang berarti melalui kontribusi tenaga dan penggunaan aset mereka tanpa adanya pungutan biaya (*free services*). Kepedulian masyarakat baik yang berada di dalam dan sekitar kawasan konservasi tentu akan mengurangi tekanan dari dalam, dan keterlibatan mereka untuk mengelola dan mencegah tekanan dari luar akan mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

BAB VI PROYEKSI KEUANGAN

Proyeksi keuangan lima tahunan mencakup Prognosa Neraca, Prognosa Pendapatan dan Laba Rugi, dan Prognosa Modal Kerja.

6.1 Prognosa Neraca

Prognosa neraca dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10. Prognosa neraca UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat tahun 2025–20229 (*Statement* per 31 Desember)

No Uraian Prognosa	Tahun Pelaksanaan				
	2024	2025	2026	2027	2028
AKTIVA					
1. Aktiva lancar					
	-	-	-	-	-
Kas pada BLUD	11,389,971,595	22,779,943,190	45,559,886,380	91,119,772,760	182,239,545,520
Piutang dari kegiatan operasional	-	-	-	-	-
Biaya dibayar dimuka	-	-	-	-	-
Persediaan (BBM, dll.)	50,103,000	100,206,000	200,412,000	400,824,000	801,648,000
2. Harta Tetap					
- Tanah	483,500,000	967,000,000	1,934,000,000	3,868,000,000	7,736,000,000
- Peralatan dan Mesin	4,029,629,556	8,059,259,112	16,118,518,224	32,237,036,448	64,474,072,896
- Gedung dan Bangunan	1,879,289,500	3,758,579,000	7,517,158,000	15,034,316,000	30,068,632,000
- Jalan, Jaringan dan irigasi	1,621,133,000	3,242,266,000	6,484,532,000	12,969,064,000	25,938,128,000
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2,133,679,610.00)	(4,267,359,220)	(8,534,718,440)	(17,069,436,880)	(34,138,873,760)
- Nilai Buku Aset Tetap	5,879,872,446	11,759,744,892	23,519,489,784	47,038,979,568	94,077,959,136
Total Aktiva	17,884,947,041	35,769,894,082	71,539,788,164	143,079,576,328	286,159,152,657
PASIVA					
1. Hutang					

No	Uraian Prognosa	Tahun Pelaksanaan				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Hutang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	Hutang Jangka Pendek	475.793.457	951,586,914	1,903,173,828	3,806,347,656	7,612,695,312
2.	Modal		-	-	-	-
	Ekuitas	17.409.153.584	34,818,307,168	69,636,614,336	139,273,228,672	278,546,457,344
	Laba ditahan					
	Total Pasiva	17,884,947,041	35,769,894,082	71,539,788,164	143,079,576,328	286,159,152,656

6.2 Prognosa Pendapatan (Surplus/Defisit)

Prognosa pendapatan dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11. Prognosa pendapatan UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat tahun 2024–20228

No	Uraian Prognosa	Tahun Pelaksanaan				
		2024	2025	2026	2027	2028
PENDAPATAN						
1.	Dana Tarif Retribusi Layanan Kawasan Konservasi	17.815.011.211	18,171,311,435	18,898,163,893	19,843,072,087	20,835,225,692
2.	Hibah Blue Abadi Fund	896.792.000	914,727,840	951,316,954	998,882,801	1,048,826,941
3.	Hibah dari Sumber Lain	-	-	-	-	-
4.	Dana APBD Provinsi	-	-	-	-	-
5.	Pendapatan Lain-lain	15.979.448	16,299,037	16,950,998	17,798,548	18,688,476
			-			
	Total Pendapatan	18.727.782.660	19,102,338,312	19,866,431,845	20,859,753,437	21,902,741,109
BIAYA						
1.	Biaya Operasional					
	a. Biaya Pelayanan					
	Biaya Pegawai	4.112.438.542	4,194,687,313	4,362,474,805	4,580,598,546	4,809,628,473
	Biaya Bahan	1.971.367.016	2,010,794,356	2,091,226,131	2,195,787,437	2,305,576,809
	Biaya Jasa Pelayanan	2.124.676.665	2,167,170,198	2,253,857,006	2,366,549,857	2,484,877,349
	Biaya Pemeliharaan	594.881.985	606,779,625	631,050,810	662,603,350	695,733,518

No	Uraian Prognosa	Tahun Pelaksanaan				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Biaya Barang dan Jasa	387.740.326	395,495,133	411,314,938	431,880,685	453,474,719
	Biaya Pelayanan Lainnya	2,617,406,359	2,669,754,486	2,776,544,666	2,915,371,899	3,061,140,494
	Total Biaya Operasional	11.808.510.894	12,044,681,111	12,526,468,355	13,152,791,773	13,810,431,362
2.	Biaya Non-operasional					
a.	Biaya Bunga	-	-	-	-	-
b.	Biaya Administrasi Bank	-	-	-	-	-
c.	Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap	-	-	-	-	-
d.	Biaya Kerugian Penurunan Nilai	-	-	-	-	-
e.	Biaya Non-operasional Lain-lain	-	-	-	-	-
	Total Biaya Non-operasional	-	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT (SEBELUM POS-POS LUAR BIASA)	6.919.271.766	9,133,438,731	9,498,776,280	9,973,715,094	10,472,400,849
	POS-POS LUAR BIASA					

6.3 Prognosa Model Kerja (Biaya dan Sumber Dana)

Prognosa modal kerja dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini:

Tabel 12. Prognosa Modal Kerja UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat tahun 2024-2028

No.	Uraian Prognosa	Tahun Pelaksanaan				
		2024	2025	2026	2027	2028
1.	Sumber Dana					
	Tambahan Modal Kerja Netto Tahun Lalu	-	-	-	-	-
	Dana Tarif Retribusi Layanan Kawasan Konservasi	17.815.011.211	18,171,311,435	18,898,163,893	19,843,072,087	20,835,225,692
	Hibah Blue Abadi Fund	4,762,744,444	277,255,556	277,255,556	277,255,556	277,255,556
	Hibah dari Sumber Lain					
	Dana APBD Provinsi					
	Pendapatan Lain-lain	-	-	-	-	-
	Total Sumber Dana					
2.	Penggunaan Dana					
	Pembayaran Hutang	-	-	-	-	-
	Biaya Operasional	11.808.510.894	23,617,021,788	47,234,043,576	94,468,087,152	188,936,174,304
	Biaya Non-operasional	-				
	Biaya Pengeluaran Investasi	1.426.316.000	2,852,632,000	5,705,264,000	11,410,528,000	22,821,056,000
	Total Penggunaan Dana					
3.	Tambahan Modal Kerja Netto	-	-	-	-	-

6.4 Proyeksi Rasio Keuangan

No	Uraian	Akhir Tahun – 31 Desember				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Perputaran Kas					
	Kas Awal Tahun	-				
	Kas Rata-rata	-				
	Kas Akhir Tahun	11.389.971.595	12,044,681,111	12,526,468,355	13,152,791,773	13,810,431,362

2	Perputaran Piutang	-				
	Piutang Awal Tahun	-				
	Piutang Rata-rata	-				
	Piutang Akhir Tahun	-	-			
3	Perputaran Persediaan					
	Persediaan Awal Tahun					
	Persediaan Rata Rata					
	Persediaan Akhir Tahun	50.103.000	11,759,744,892	23,519,489,784	47,038,979,568	94,077,959,136
4	Harta Tetap					
	Harta Tetap Awal Tahun	5.879.872.446	100,206,000	200,412,000	400,824,000	801,648,000
	Harta Tetap Rata-rata					
	Harta Tetap Akhir Tahun					
5	Rasio Hutang Jangka Panjang dengan Aktiva					
	Hutang Jangka Panjang	-				
6	Rasio Modal dengan Aktiva					
	Modal	-				

VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai pedoman bagi UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dalam melaksanakan setiap program kerja secara maksimal dalam mengelola KKP Kepulauan Raja Ampat, sehingga fungsi pembentukan KKP Kepulauan Raja Ampat yang telah dimandatkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan bisa tercapai.

Penerapan BLUD pada UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat diharapkan akan mampu memicu dan meningkatkan produktivitas dan pelayanan dalam menyediakan kawasan yang terkelola dengan baik kepada masyarakat. Secara khusus untuk masyarakat di sekitar Kepulauan Raja Ampat dengan menjamin ketersediaan pangan dan tempat mencari nafkah untuk peningkatan ekonomi masyarakat, dan juga bagi masyarakat global untuk tetap dapat menikmati keindahan alam dan ekosistem yang sehat untuk penelitian dan ilmu pengetahuan di masa depan.

Rencana Strategis UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat ini merupakan hasil pemikiran dan aspirasi target pelayanan, kinerja dan sasaran yang ingin dicapai UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Melalui visi dan misi yang dikemukakan, serta program kerja yang disusun diharapkan dapat berjalan dengan maksimal sehingga berdaya guna bagi pemerintah, masyarakat, dan semua pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan terkait didalamnya. Keterpaduan dari berbagai unsur dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta pihak lain akan menjamin pengelolaan yang baik untuk KKP Kepulauan Raja Ampat.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Biaya Berdasarkan Alokasi Biaya (Tidak Termasuk Gaji PNS)

ALOKASI BIAYA	TOTAL BIAYA				
	2025	2026	2027	2028	2029
A. BIAYA OPERASIONAL					
1. Biaya Pegawai	7,213,200,000	7,213,200,000	7,357,464,000	7,651,762,560	8,034,350,688
2. Biaya Barang dan Jasa	18,597,287,273	18,597,287,273	18,969,233,018	19,728,002,339	20,714,402,456
3. Biaya Bunga	-	-	-	-	-
4. Biaya Lainnya	30,000,000	30,000,000	30,600,000	31,824,000	33,415,200
B. BELANJA MODAL					
1. Belanja Tanah	300,000,000	300,000,000	306,000,000	318,240,000	334,152,000
2. Belanja Peralatan dan Mesin	1,908,700,000	1,908,700,000	1,946,874,000	2,024,748,960	2,125,986,408
3. Belanja Gedung dan Bangunan	350,000,000	350,000,000	357,000,000	371,280,000	389,844,000
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	300,000,000	300,000,000	306,000,000	318,240,000	334,152,000
5. Belanja Aset tetap lainnya	150,000,000	150,000,000	153,000,000	159,120,000	167,076,000
6. Belanja Aset lainnya	-	-	-	-	-
TOTAL	28,849,187,273	29,426,171,018	30,603,217,859	32,133,378,752	33,740,047,690

Lampiran 2. Rencana Biaya Kegiatan untuk Setiap Program Strategis (Tidak Termasuk Gaji PNS)

PROGRAM STRATEGIS DAN KEGIATAN		2025	2026	2027	2028	2029
I. PROGRAM STRATEGIS PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLA DAN PARA PIHAK		17,140,090,273	17,482,892,078	18,182,207,762	19,091,318,150	20,045,884,057
1	Pemantapan UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat Sebagai SUOP	480,000,000	489,600,000	509,184,000	534,643,200	561,375,360
2	Peningkatan Kapasitas Pengelola UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat	8,378,200,000	8,545,764,000	8,887,594,560	9,331,974,288	9,798,573,002

3	Pengembangan Sarana dan Prasarana	7,376,228,000	7,523,752,560	7,824,702,662	8,215,937,796	8,626,734,685
4	Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan	126,987,273	129,527,018	134,708,099	141,443,504	148,515,679
5	Implementasi Jejaring Kawasan Konservasi di Bentang laut Kepala Burung di Provinsi Papua dan Papua Barat Daya	20,000,000	20,400,000	21,216,000	22,276,800	23,390,640
6	Komunikasi dan Publikasi	708,675,000	722,848,500	751,762,440	789,350,562	828,818,090
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Program	50,000,000	51,000,000	53,040,000	55,692,000	58,476,600
PROGRAM STRATEGIS PENGUATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA		5,029,780,000	5,130,375,600	5,335,590,624	5,602,370,155	5,882,488,663
	1. Terlindunginya Habitat dan populasi Ikan	543,675,000	554,548,500	576,730,440	605,566,962	635,845,310
	2. Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut serta biota penting	518,715,000	529,089,300	550,252,872	577,765,516	606,653,791
	3. Edukasi, kerjasama lembaga penelitian/ perguruan tinggi/mitra lainnya	80,000,000	81,600,000	84,864,000	89,107,200	93,562,560
	4. Pemanfaatan KKP	2,635,000,000	2,687,700,000	2,795,208,000	2,934,968,400	3,081,716,820
	5. Jaga Laut	687,350,000	701,097,000	729,140,880	765,597,924	803,877,820
	6. Pengelolaan Spesies Yang Dilindungi	60,000,000	61,200,000	63,648,000	66,830,400	70,171,920
	7. Spesis Introduksi atau Invasif	40,000,000	40,800,000	42,432,000	44,553,600	46,781,280
	8. Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	15,000,000	15,300,000	15,912,000	16,707,600	17,542,980
	9. Mitigasi degradasi lingkungan akibat pembangunan di pesisir dan laut	10,000,000	10,200,000	10,608,000	11,138,400	11,695,320
	10. Adaptasi Perubahan Iklim	5,000,000	5,100,000	5,304,000	5,569,200	5,847,660
	11. Penyelenggaraan Pungutan Jasa Layanan Pengguna KKP (TLPJL)	435,040,000	443,740,800	461,490,432	484,564,954	508,793,201
PROGRAM STRATEGIS PENGUATAN SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA MASYARAKAT DI KAWASAN		1,630,345,000	1,662,951,900	1,729,469,976	1,815,943,475	1,906,740,649

	1. Pendidikan lingkungan hidup	171,145,000	174,567,900	181,550,616	190,628,147	200,159,554
	2. Pemberdayaan /penguatan Masyarakat/kelembagaan dalam kawasan	600,000,000	612,000,000	636,480,000	668,304,000	701,719,200
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Kecil Masyarakat	859,200,000	876,384,000	911,439,360	957,011,328	1,004,861,894
PROGRAM STRATEGIS PENGUATAN PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEMANTAUAN SDA		171,562,000	174,993,240	181,992,970	191,092,618	200,647,249
1	Monitoring dan evaluasi kelembagaan pengelolaan KKP Raja Ampat	40,000,000	40,800,000	42,432,000	44,553,600	46,781,280
2	Monitoring dan evaluasi pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di KKP Raja Ampat	30,000,000	30,600,000	31,824,000	33,415,200	35,085,960
3	Monitoring dan evaluasi kondisi sumberdaya alam dan social ekonomi	30,000,000	30,600,000	31,824,000	33,415,200	35,085,960
4.	Monitoring dan evaluasi pengguna KKP Raja Ampat	41,562,000	42,393,240	44,088,970	46,293,418	48,608,089
5.	Evaluasi efektivitas pengelolaan dan dokumen rencana pengelolaan KKP Raja Ampat	30,000,000	30,600,000	31,824,000	33,415,200	35,085,960
	TOTAL	23,971,777,273	24,451,212,818	25,429,261,331	26,700,724,398	28,035,760,618

Lampiran 3. Rencana Biaya Kegiatan untuk Setiap Situs (Tidak Termasuk Gaji PNS)

KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
Kantor UPTD PENGELOLAAN Kepulauan Raja Ampat					
1. Pemantapan UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat Sebagai SUOP					
2. Peningkatan Kapasitas Pengelola UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat					
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana					
4. Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan					
5. Implementasi Jejaring Kawasan Konservasi di Bentang laut Kepala Burung di Provinsi Papua dan Papua Barat Daya					
6. Komunikasi dan Publikasi					
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Program					
8. Terlindunginya Habitat dan populasi Ikan					
9. Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut serta biota penting					
10. Edukasi, kerjasama lembaga penelitian/perguruan tinggi/mitra lainnya					
11. Pemanfaatan KKP					
12. Jaga Laut					
13. Pengelolaan Spesies Yang Dilindungi					
14. Spesis Introduksi atau Invasif					
15. Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap					
16. Mitigasi degradasi lingkungan akibat pembangunan di pesisir dan laut					
17. Adaptasi Perubahan Iklim					
18. Penyelenggaraan Pungutan Jasa Layanan Pengguna KKP (TLPJL)					
19. Pendidikan lingkungan hidup					

KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
20. Pemberdayaan /penguatan Masyarakat/kelembagaan dalam kawasan					
21. Pengembangan Usaha Ekonomi Kecil Masyarakat					
22. Monitoring dan evaluasi kelembagaan pengelolaan KKP Raja Ampat					
23. Monitoring dan evaluasi pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di KKP Raja Ampat					
24. Monitoring dan evaluasi kondisi sumberdaya alam dan social ekonomi					
25. Monitoring dan evaluasi pengguna KKP Raja Ampat					
26. Evaluasi efektivitas pengelolaan dan dokumen rencana pengelolaan KKP Raja Ampat					
Area I Kepulauan Ayau Asia					
1. Pemantapan UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat Sebagai SUOP					
2. Peningkatan Kapasitas Pengelola UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat					
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana					
4. Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan					
5. Implementasi Jejaring Kawasan Konservasi di Bentang laut Kepala Burung di Provinsi Papua dan Papua Barat Daya					
6. Komunikasi dan Publikasi					
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Program					
8. Terlindunginya Habitat dan populasi Ikan					
9. Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut serta biota penting					
10. Edukasi, kerjasama lembaga penelitian/perguruan tinggi/mitra lainnya					
11. Pemanfaatan KKP					
12. Jaga Laut	502,700,000	512,754,000	533,264,160	559,927,368	587,923,736
13. Pengelolaan Spesies Yang Dilindungi					

KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
14. Spesis Introduksi atau Invasif					
15. Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap					
16. Mitigasi degradasi lingkungan akibat pembangunan di pesisir dan laut					
17. Adaptasi Perubahan Iklim					
18. Penyelenggaraan Pungutan Jasa Layanan Pengguna KKP (TLPJL)					
19. Pendidikan lingkungan hidup					
20. Pemberdayaan /penguatan Masyarakat/kelembagaan dalam kawasan					
21. Pengembangan Usaha Ekonomi Kecil Masyarakat					
22. Monitoring dan evaluasi kelembagaan pengelolaan KKP Raja Ampat					
23. Monitoring dan evaluasi pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di KKP Raja Ampat					
24. Monitoring dan evaluasi kondisi sumberdaya alam dan social ekonomi					
25. Monitoring dan evaluasi pengguna KKP Raja Ampat					
26. Evaluasi efektivitas pengelolaan dan dokumen rencana pengelolaan KKP Raja Ampat					
Area II Teluk Mayalibit					
1. Pemantapan UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat Sebagai SUOP					
2. Peningkatan Kapasitas Pengelola UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat					
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana					
4. Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan					
5. Implementasi Jejaring Kawasan Konservasi di Bentang laut Kepala Burung di Provinsi Papua dan Papua Barat Daya					
6. Komunikasi dan Publikasi					

KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Program					
8. Terlindunginya Habitat dan populasi Ikan					
9. Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut serta biota penting					
10. Edukasi, kerjasama lembaga penelitian/ perguruan tinggi/mitra lainnya					
11. Pemanfaatan KKP					
12. Jaga Laut	491,490,000	501,319,800	521,372,592	547,441,222	574,813,283
13. Pengelolaan Spesies Yang Dilindungi					
14. Spesis Introduksi atau Invasif					
15. Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap					
16. Mitigasi degradasi lingkungan akibat pembangunan di pesisir dan laut					
17. Adaptasi Perubahan Iklim					
18. Penyelenggaraan Pungutan Jasa Layanan Pengguna KKP (TLPJL)					
19. Pendidikan lingkungan hidup					
20. Pemberdayaan /penguatan Masyarakat/kelembagaan dalam kawasan					
21. Pengembangan Usaha Ekonomi Kecil Masyarakat					
22. Monitoring dan evaluasi kelembagaan pengelolaan KKP Raja Ampat					
23. Monitoring dan evaluasi pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di KKP Raja Ampat					
24. Monitoring dan evaluasi kondisi sumberdaya alam dan social ekonomi					
25. Monitoring dan evaluasi pengguna KKP Raja Ampat					
26. Evaluasi efektivitas pengelolaan dan dokumen rencana pengelolaan KKP Raja Ampat					
Area III Perairan Selat Dampier					

KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
1. Pemantapan UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat Sebagai SUOP					
2. Peningkatan Kapasitas Pengelola UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat					
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana					
4. Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan					
5. Implementasi Jejaring Kawasan Konservasi di Bentang laut Kepala Burung di Provinsi Papua dan Papua Barat Daya					
6. Komunikasi dan Publikasi					
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Program					
8. Terlindunginya Habitat dan populasi Ikan					
9. Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut serta biota penting					
10. Edukasi, kerjasama lembaga penelitian/perguruan tinggi/mitra lainnya					
11. Pemanfaatan KKP					
12. Jaga Laut	1,553,120,000	1,584,182,400	1,647,549,696	1,729,927,181	1,816,423,540
13. Pengelolaan Spesies Yang Dilindungi					
14. Spesis Introduksi atau Invasif					
15. Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap					
16. Mitigasi degradasi lingkungan akibat pembangunan di pesisir dan laut					
17. Adaptasi Perubahan Iklim					
18. Penyelenggaraan Pungutan Jasa Layanan Pengguna KKP (TLPJL)					
19. Pendidikan lingkungan hidup					
20. Pemberdayaan /penguatan Masyarakat/kelembagaan dalam kawasan					
21. Pengembangan Usaha Ekonomi Kecil Masyarakat					

KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
22. Monitoring dan evaluasi kelembagaan pengelolaan KKP Raja Ampat					
23. Monitoring dan evaluasi pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di KKP Raja Ampat					
24. Monitoring dan evaluasi kondisi sumberdaya alam dan social ekonomi					
25. Monitoring dan evaluasi pengguna KKP Raja Ampat					
26. Evaluasi efektivitas pengelolaan dan dokumen rencana pengelolaan KKP Raja Ampat					
Area IV Kepulauan Misool					
1. Pemantapan UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat Sebagai SUOP					
2. Peningkatan Kapasitas Pengelola UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat					
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana					
4. Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan					
5. Implementasi Jejaring Kawasan Konservasi di Bentang laut Kepala Burung di Provinsi Papua dan Papua Barat Daya					
6. Komunikasi dan Publikasi					
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Program					
8. Terlindunginya Habitat dan populasi Ikan					
9. Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut serta biota penting					
10. Edukasi, kerjasama lembaga penelitian/perguruan tinggi/mitra lainnya					
11. Pemanfaatan KKP					
12. Jaga Laut	472,700,000	482,154,000	501,440,160	526,512,168	552,837,776
13. Pengelolaan Spesies Yang Dilindungi					
14. Spesies Introduksi atau Invasif					
15. Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap					

KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
16. Mitigasi degradasi lingkungan akibat pembangunan di pesisir dan laut					
17. Adaptasi Perubahan Iklim					
18. Penyelenggaraan Pungutan Jasa Layanan Pengguna KKP (TLPJL)					
19. Pendidikan lingkungan hidup					
20. Pemberdayaan /penguatan Masyarakat/kelembagaan dalam kawasan					
21. Pengembangan Usaha Ekonomi Kecil Masyarakat					
22. Monitoring dan evaluasi kelembagaan pengelolaan KKP Raja Ampat					
23. Monitoring dan evaluasi pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di KKP Raja Ampat					
24. Monitoring dan evaluasi kondisi sumberdaya alam dan social ekonomi					
25. Monitoring dan evaluasi pengguna KKP Raja Ampat					
26. Evaluasi efektivitas pengelolaan dan dokumen rencana pengelolaan KKP Raja Ampat					
Area V Kepulauan Kofiau-Boo					
1. Pemantapan UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat Sebagai SUOP					
2. Peningkatan Kapasitas Pengelola UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat					
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana					
4. Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan					
5. Implementasi Jejaring Kawasan Konservasi di Bentang laut Kepala Burung di Provinsi Papua dan Papua Barat Daya					
6. Komunikasi dan Publikasi					
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Program					
8. Terlindunginya Habitat dan populasi Ikan					

KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
9. Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut serta biota penting					
10. Edukasi, kerjasama lembaga penelitian/ perguruan tinggi/mitra lainnya					
11. Pemanfaatan KKP					
12. Jaga Laut	477,700,000	487,254,000	506,744,160	532,081,368	558,685,436
13. Pengelolaan Spesies Yang Dilindungi					
14. Spesis Introduksi atau Invasif					
15. Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap					
16. Mitigasi degradasi lingkungan akibat pembangunan di pesisir dan laut					
17. Adaptasi Perubahan Iklim					
18. Penyelenggaraan Pungutan Jasa Layanan Pengguna KKP (TLPJL)					
19. Pendidikan lingkungan hidup					
20. Pemberdayaan /penguatan Masyarakat/kelembagaan dalam kawasan					
21. Pengembangan Usaha Ekonomi Kecil Masyarakat					
22. Monitoring dan evaluasi kelembagaan pengelolaan KKP Raja Ampat					
23. Monitoring dan evaluasi pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di KKP Raja Ampat					
24. Monitoring dan evaluasi kondisi sumberdaya alam dan social ekonomi					
25. Monitoring dan evaluasi pengguna KKP Raja Ampat					
26. Evaluasi efektivitas pengelolaan dan dokumen rencana pengelolaan KKP Raja Ampat					
Area VI Kepulauan Fam					
1. Pemantapan UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat Sebagai SUOP					

KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
2. Peningkatan Kapasitas Pengelola UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat					
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana					
4. Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan					
5. Implementasi Jejaring Kawasan Konservasi di Bentang laut Kepala Burung di Provinsi Papua dan Papua Barat Daya					
6. Komunikasi dan Publikasi					
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Program					
8. Terlindunginya Habitat dan populasi Ikan					
9. Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut serta biota penting					
10. Edukasi, kerjasama lembaga penelitian/ perguruan tinggi/mitra lainnya					
11. Pemanfaatan KKP					
12. Jaga Laut	473,300,000	482,766,000	502,076,640	527,180,472	553,539,496
13. Pengelolaan Spesies Yang Dilindungi					
14. Spesis Introduksi atau Invasif					
15. Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap					
16. Mitigasi degradasi lingkungan akibat pembangunan di pesisir dan laut					
17. Adaptasi Perubahan Iklim					
18. Penyelenggaraan Pungutan Jasa Layanan Pengguna KKP (TLPJL)					
19. Pendidikan lingkungan hidup					
20. Pemberdayaan /penguatan Masyarakat/kelembagaan dalam kawasan					
21. Pengembangan Usaha Ekonomi Kecil Masyarakat					
22. Monitoring dan evaluasi kelembagaan pengelolaan KKP Raja Ampat					

KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
23. Monitoring dan evaluasi pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di KKP Raja Ampat					
24. Monitoring dan evaluasi kondisi sumberdaya alam dan social ekonomi					
25. Monitoring dan evaluasi pengguna KKP Raja Ampat					
26. Evaluasi efektivitas pengelolaan dan dokumen rencana pengelolaan KKP Raja Ampat					
Area VII Misool Bagian Utara					
1. Pemantapan UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat Sebagai SUOP					
2. Peningkatan Kapasitas Pengelola UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat					
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana					
4. Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan					
5. Implementasi Jejaring Kawasan Konservasi di Bentang laut Kepala Burung di Provinsi Papua dan Papua Barat Daya					
6. Komunikasi dan Publikasi					
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Program					
8. Terlindunginya Habitat dan populasi Ikan					
9. Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut serta biota penting					
10. Edukasi, kerjasama lembaga penelitian/perguruan tinggi/mitra lainnya					
11. Pemanfaatan KKP					
12. Jaga Laut	906,400,000	924,528,000	961,509,120	1,009,584,576	1,060,063,805
13. Pengelolaan Spesies Yang Dilindungi					
14. Spesis Introduksi atau Invasif					
15. Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap					
16. Mitigasi degradasi lingkungan akibat pembangunan di pesisir dan laut					

KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
17. Adaptasi Perubahan Iklim					
18. Penyelenggaraan Pungutan Jasa Layanan Pengguna KKP (TLPJL)					
19. Pendidikan lingkungan hidup					
20. Pemberdayaan /penguatan Masyarakat/kelembagaan dalam kawasan					
21. Pengembangan Usaha Ekonomi Kecil Masyarakat					
22. Monitoring dan evaluasi kelembagaan pengelolaan KKP Raja Ampat					
23. Monitoring dan evaluasi pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum di KKP Raja Ampat					
24. Monitoring dan evaluasi kondisi sumberdaya alam dan social ekonomi					
25. Monitoring dan evaluasi pengguna KKP Raja Ampat					
26. Evaluasi efektivitas pengelolaan dan dokumen rencana pengelolaan KKP Raja Ampat					
Total	4,877,410,000	4,974,958,200	5,173,956,528	5,432,654,354	5,704,287,072